BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan partai politik dapat dilihat dalam perspektif hak asasi manusia serta keberadaannya sebagai suatu badan hukum. Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Franz Magnis Suseno menyatakan bahwa dari sisi etika politik manusia adalah makhluk individu, yang secara hakikat bersifat sosial. Individualitasnya dihayati dalam tindakan manusia yang sadar dan disengaja. Individualitas tersebut memberi manusia kebebasan bertindak, bisa menyesuaikan diri maupun melawan masyarakat. Kebesan tersebut menghasilkan pertanggungjawaban atas tindakan yang dipilih. Hubungan sosial manusia terjadi secara terstruktur sebagai sesuatu organisasi. Organisasi sebagai bentuk hubungan sosial manusia berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia mulai dari keluarga sampai organisasi yang bersifat internasional.

Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup berorganisasi. Dalam pandangan Locke dan Rousseau, kecenderungan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan fikiran dan hati nurani. Oleh karena itu, dalam perkembangan kebebasan berserikat menjadi salah satu kebebasan dasar manusia yang diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi

manusia dengan istilah kebebasan berserikat (*freedom of association).* Menurut Richard H.Pildes, tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat manusia dapat berkurang karena dengan sendirinya seorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya. [1]

Masyarakat yang secara minimal memperoleh kesempatan untuk mengenal berbagai sistem politik di dunia ini dan mencoba mengurus diri sendiri dengan memperaktekan salah satu atau kombinasi dari berbagai sistem politik yang dikenalnya; di dalam waktu yang singkat sekaligus dihadapkan kepada tanggung jawab untuk mengatasi segala keterbelakangannya. Demikianlah halnya sama dengan Partai Politik.[2]

Teori-teori politik mempunyai dasar moral fungsinya terutama untuk menentukan pedoman dan patokan moral yang sesuai dengan akhlak. Semua fenomena politik ditafsirkan dalam rangka tujuan dan pedoman moral ini, karena dianggap bahwa dalam kehidupan politik yang sehat diperlukan pedoman dan patokan. Teori-teori semacam ini mencoba mengatur hubungan interaksi antara anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga di satu pihak memberi putusan perorangan, dan pihak lain dapat membimbingnya menuju ke suatu struktur masyarakat politik yang stabil tetapi dinamis. Atas dasar itu teori politik menetapkan

---

[1] Muchamad Ali Safa'at ,*Pembubaran Partai Politik,*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011), h. 13-14

[2] Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2008), h.19

suatu kode etik atau tata cara yang harus dijadikan pegangan dalam kehidupan politik.[3]

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pemikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Sejak gerakkan Reformasi bergulir pada 1997-1998 dan berhasil *''memaksa''* presiden Soeharto *lengser* atau mundur dari kekusaannya selama lebih dari 30 tahun, system politik di Indonesia berubah drastis. Selama lebih tiga dekade rezim Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto, bangsa Indonesia dikenal salah satu Negara yang menganut sistem politik otoriter. Meskipun presiden Soeharto sendiri menamakan sistem politik yang dipertahankannya selama tiga dekade sebagai "Demokrasi Pancasila".

Sejumlah elemen otoritarianisme rezim Orde Baru diantaranya adalah, pertama, kepemimpinan presiden yang berlangsung selama (tujuh) periode sejak 1966, atau tepatnya secara formal sebagai pejabat presiden pada 1967. Meskipun UUD 1945 sebelum amandemen secara subtansial membatasi kekuasaan presiden hingga dua periode, rezim orde baru melakukan penafsiran subyektif atas anak kalimat dalam pasal 7 konstitusi yang berbunyi *"dan sesudahnya dapat dipilih*

---

[3] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018),H. 44

kembali", sehingga Soeharto dipilih kembali secara berturut-turut oleh MPR hingga tujuh kali masa jabatannya.[4]

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.[5]

Hampir semua Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi dengan model dua atau multipartai memiliki Undang-Undang kepartaian. Di Indonesia hampir setiap pelaksanaan pemilihan umum Undang-Undang kepartaian ditinjau, sehingga boleh dikata Indonesia sejak merdeka pada 1945 sudah memiliki 8 Undang-Undang kepartaian. Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2011 pasal 2 dinyatakan syarat pembentukan partai politik di Indonesia. [6]

Eksistensi partai politik di arena politik merupan reprensi ekspresi kebebasan berorganisasi untuk mencapai kekuasaan dengan melakukan mobilisasi kekuatan diantara kelompok-kelompok kepentingan maupun penekanan yang ada di masyarakat. Namun, partai politik harus memiliki badan hukum apabila ingin terlibat menjadi salah satu kontestan yang sah

---

[4] Syamsuddin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi,* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h.1

[5] Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik… h.403-404

[6] Hafied Cangara, *Komunikasi Politik,*(Depok: PT RajaGrafindo Persada 2009), h.170-171

dalam mekanisme perebutan kekuasaan di suatu Negara. Di Negara demokrasi, mekanisme perebutan kekuasaan itu adalah pemilu. Artinya, untuk menjadi salah satu peserta pemilu, partai politik baik lama maupun baru harus didirikan secara resmi dan telah memenuhi persyaratan administratif berupa kepengurusan dan kantor yang tetap serta mempunyai dukungan yang kuat dan luas dari masyarakat untuk menjadi badan hukum publik dan dapat bertindak sebagai badan yang transparan publik. Di Indonesia, partai politik juga harus didirikan secara resmi dan menjadi badan hukum yang nantinya sah menjadi peserta pemilu. Pasal 3 UU No.1/2011 tentang partai politik. Sedangkan, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.37 tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran pendirian badan hukum, perubahan Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan partai politik.[7]

Selanjutnya, Tim verifikasi partai politik tahun 2016 terdiri dari: Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri (Direktorat jenderal politik dan Pemerintah Umum), Kesbangpol Tingkat Provinsi dan kabupaten/Kota, serta tim Teknis lainnya.

Tim melakukan Verifikasi Administrasi dan Faktual selama 45 hari Kerja. Untuk Verifikasi tahap I (Administrasi), dilaksanakan tanggal 1 – 15 Agustus 2016 dengan memeriksa dan meneliti persyaratan yang dilampirkan secara administrasi dan

---

[7] Fadli, *Pembentukan Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1011 Tentang Partai Politik,* (Makasar: Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin 2012)

substansi, seperti: Surat keterangan Kesbangpol Provinsi, Kabupaten/kota, dan Kecamatan. Surat Keterangan domisili Surat keterangan domisili partai yang disertai bukti sah status kantor partai tingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Surat pernyataan sebagai pengurus partai politik disertai dengan fotocopy KTP. Kemudian dilanjutkan dengan Verifikasi Tahap II (Faktual) dengan memeriksa secara langsung terhadap keabsahan dokumen persyaratan yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus-23 September 2016.

Dari Partai Politik yang kami Verifikasi, hanya 1 (satu) Partai politik, yaitu: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang memenuhi syarat dan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik dan Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 37 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik.[8]

Partai Solidaritas Indonesia adalah kekuatan politik baru yang ingin mengembalikan politik ke tempat yang terhormat. PSI lahir dari kesadaran bahwa politik adalah sebuah tugas mulia untuk mewujudkan kebahagiaan bagi semua orang. Atas dasar itulah kami bertekad mengakhiri permasalah yang ada di politik hari ini dengan mengembalikan politik kepada nilainya yang luhur. Kami ingin mendekatkan kembali politik dengan nilai-nilai kebajikan

[8] Hasil Verifikasi Pendaftaran Partai Politik Baru Menjadi Badan Hukum Tahun 2016, https://www.kemenkumham.go.id/berita/hasil-verifikasi-pendaftaran-partai-politik-baru-menjadi-badan-hukum-tahun-2016,07 oktober 2016.

agar lahir *negarawan* yang seluruh pikiran dan tindakannya didasarkan atas kepentingan yang lebih besar untuk bangsa dan negara Indonesia, bukan sekadar kepentingan pribadi politik dalam jangka pendek.[9]

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (Mk) Mahfud MD menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjanjikan alternatif dalam keruwetan politik saat ini, termasuk mengatasi problem krisis kepemimpinan. Ini partai isinya anak-anak muda, nggak pernah punya pengalaman politik," tegasnya. Menurut Mahfud yang juga tokoh Nahdlatul Ulama ini, harus diperbanyak orang-orang yang baik di partai politik. Harapannya tetap konsisten dengan idealisme anak muda. Jangan kemudian masuk ke dalam sistem bobrok yang melanda partai politik kebanyakan. Meskipun tidak bisa digeneralisir. Tapi saya optimis PSI bisa bertarung di 2019"[10].

Partai yang lahir pada 16 November 2014 ini menargetkan kaum milenial dan perempuan Indonesia lintas agama untuk menjadi anggota partainya. Bahkan, partai berideologi Pancasila dan pluralisme ini melibatkan perempuan secara aktif dalam mengambil keputusan politik. Partai ini dibentuk oleh Grace Natalie, seorang mantan presenter dan

---

[9] Apa PSI, https://psi.id/berita/content/apa-itu-psi/, DPP PSI Jl. K.H. Wahid Hasyim No.194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250

[10] Hasanudin Aco, Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mahfud MD Nilai PSI Beda dengan Partai Lain,http://www.tribunnews.com/nasional/2015/03/27/mahfud-md-nilai-psi-beda-dengan-partai-lain.

jurnalis. Anggota PSI aktif menggunakan media sosial Twitter dan Facebook untuk mengundang kaum milenial berpartisipasi dalam kegiatan politik.[11]

Keanggotaan partai biasanya dilakukan secara formal. Dalam setiap partai ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengatur keanggotaan partai. seseorang yang ingin melamar menjadi anggota partai disyaratkan mengisi keanggotaan. Setelah melalui proses pertimbangan, partai dapat menerima atau menolak lamaran itu.[12] Fungsi selanjutnya adalah rekrutmen politik. Melalui partai politik dilakukan rekrutmen dan seleksi terhadap calon-calon anggota lembaga Pimpinan. Calon-calon tersebut yang nantinya akan dipilih rakyat.[13]

Selanjutnya, model rekrutmen keanggotaan partai solidaritas Indonesia sendiri dengan cara mudah bagi masyarakat atau kaum millennial bisa bergabung dan bisa membuka web PSI untuk mendaftarkan diri secara online. Mekanisme penerimaan anggota kami mengambil aplikasi yang tersedia di PSI.id jadi mayoritas anggota orang-orang yang suka rela tertarik yang memiliki paham yang sama dengan PSI dan tidak memiliki sejarah calon anggota yang sudah mengikuti atau terlibat dalam partai lain, disini PSI menolak bagi calon apabila pernah menjadi anggota ataupun pengurus harian partai lain. Pola kaderisasi,

---

[11] PSI Wadah Politik Millenial, *https://www.liputan6. com/pileg/read /3629585/psi-wadah-politik-kaum-milenial* , 27 agustus 2018, Pukul 20:53 WIB

[12] Hafied Cangara, *Komunikasi Politik*… h. 175

[13] Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Politik*... h.68

kaderisasi berjenjang mungkin setelah pemilu 2019 ini seluruh pengurus psi akan membicaraka pola kaderisasi yang berjenjang PSI juga lebih ke mentranfer knowledge dan jiwa PSI, mekanisme untuk menjadi pengurus harian PSI pun kami merekrut maksimal umur 45 tahun dan tidak sama sekali pernah menjadi pengurus harian partai lain, sedangkan kalau anggota kita tidak ada batasan umur tapi harus bersih dari catatan korupsi meskipun umur calon pelamar itu lebih dari 45 tahun meskipun sudah fashion old tetapi pelamar memiliki kredibilitas yang tinggi psi menerimanya. Dengan niat baik psi ini hadir untuk mengajak kaum muda dan partai yang ramah dengan perempuan, memberikan kesempatan untuk sama-sama aktif dalam menentukan masa depan bangsa. Dan PSI memberikan porsi yang besar bagi perempuan untuk menjadi pengurus PSI hampir 30% PSI diduduki oleh perempuan dalam pengurus PSI. dengan cara yang baik kami juga yakin akan mendapatkan yang baik, inilah cara sadar PSI sebagai partai baru untuk memutus mata rantai dari perilaku , spirit, dan tradisi untuk partai-partai politik lama.

Menuju pemilu 2019 pun PSI memberikan sajian yang sehat untuk rakyat Indonesia untuk menentukan calon-calon pemimpin yang benar-benar menjadi pelayan rakyat, PSI juga salah satu partai yang dukung KPU untuk caleg eks napi korupsi. Sedangkan untuk penjaringan calon legislatif baik tingkat daerah provinsi, maupun Nasional. PSI sendiri melakukan wawancara yang jurinya Indipenden seperti Mahfud MD mantan ketua

mahkamah kostitusi, selain itu melihat background pendidikan, sikap politik pelamar, pandangan politik tentang korupsi dan intoleransi.[14]

Maka dari itu penulis ingin meneliti salah satu partai baru di Indonesia yang berada di Provinsi Banten sebagai tolak ukur rekrutmen yang dianut oleh suatu partai untuk melahirkan pemimpin-pemimpin atau wakil-wakil rakyat yang bersih. PSI ini sebagai partai politik yang menawarkan kebaruan dalam politik Indonesia dengan kepengurusan dibawah 45 tahun dan belum pernah menjadi anggota partai lain, selain itu PSI ini mengajak generasi millennial dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik agar masyarakat Indonesia sadar untuk berpolitik sedikit mengurangi apatisme yang ada di Indonesia.

Dengan mekanisme rekrutmen anggota sampai dengan mekanisme penjaringan untuk percalonan wakil rakyat yang menduduki kursi parlemen, yang dilakukan PSI sangat berbeda dengan partai-partai lain, terlebih penulis melihat banyak sekali generasi muda yang sadar akan politik hingga mereka ingin mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin disetiap daerah dari dapil mereka sendiri.

Maka untuk membahas lebih lanjut dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan judul **"MODEL**

---

[14] Hasil Wawancara Dengan Bapak Budi Harto, *ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Banten,* Pada Tanggal 26 September 2018. Waktu 14:20 WIB

REKRUTMEN KEANGGOTAAN PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA DEWAN PIMPINAN WILAYAH BANTEN."

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa latar belakang berdirinya PSI?
2. Bagaimana mekanisme perekrutan keanggotaan PSI?
3. Bagaimana strategi PSI Mengusung anggota Partainya Untuk menjadi Calon Legislatif?

C. Fokus Penelitian

Untuk lebih terarahnya pokok permasalahan pada penelitian ini maka penulis memfokuskan permasalahan pada model rekrutmen keanggotaan partai solideritas indonesia (stadi partai solideritas dewan pimpinan wilayah Banten).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang berdirinya PSI.
2. Untuk mengetahui mekanisme perekrutan keanggatan PSI.
3. Untuk menjelaskan bagaimana strategi PSI Untuk mengusung anggotanya menjadi Calon legislatif.

E. Manfaat atau Signifikan Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan yang diharapkan dari rencana penulisan ini adalah:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini ditujukan untuk membangun ilmu hukum pada umumnya dan politik pada khususnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang jelas dan pasti terkait penerapan UU No. 2 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 terhadap partai politik.
2. Manfaat Praktis, adapun manfaat praktis yang penulis harapkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi yang jelas dalam mengklasifikasikan undang-undang dengan partai politik.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai pendukung yang. Salah salah satu dari data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Peran dan pola rekrutmen partai politik. Oleh

karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil berupa skripsi.

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Berapa penelitian yang ditemukan tersebut :

1. POLA REKRUTMEN PARTAI POLITIK (Stadi: Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Dalam Menetapkan Caleg Pada Pemilu Leislatif 2009 Di Kabupaten Agam). Penulis : Wengky Sapurta, Universitas Andalas/ 2012.

   Hasil penelitian ini menujukan bahwa adanya pertimbangan yang diambil oleh DPC partai Demokrat untuk menetapkan Caleg berdasarkan JUKLAK Nomor. 03/Juklak/DPP.PD/VII/2008 tentang mekanisme penjaringan Caleg. Perihal ini partai democrat memberikan kebebasan yang sama kepada semua warga Negara untuk menjadi Caleg. Ada berapa kriteria yang tidak terpenuhi oleh Caleg, seperti pendidikan masih banyak yang belum S1, popilaritas, akseptabilat dan kapabilitas belum terpenuhi.[15]

   Adapun perbedaan penelitian di atas dengan peneliti terletak pada model rekrutmen dalam PSI terdapat dua bagian yaitu online dan tranksaksi langsung melalui relasi

[15]Repository.unand.ac.id,tgl 17 Des 2018, 20:09

kader terhadap masyarakat, calon anggota legislatif yang melamar harus membuat karya ilmiah yang berjudul melawan korupsi dan intoleransi di presentasikan kepada juri independen hasil keputusan juri independen dalam hal ini tidak dapat di intervensi oleh elit PSI.

2. STUDI DESKRIPTIF PROSES PENDERIAN PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA. Penulis: Gusti Natalia Gulton / Universitas Sumatra Utara / 2017.

   Penelitian ini mencoba menguraikan dan menganalisis Strategi Partai Solidaritas Indonesia dalam Verifikasi Kementriian Hukum Dan HAM. Langkah-langkah tersebut meliputi pembentukan structural yang ramping mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan. Strategi pemanfaatan teknologi seperti halnya teknologi informasi dan internet membawa pengaruh besar terhadap demokrasi yang biasa dikenal elektronik demokrasi.[16]

   Terakhir yang membedakan penelitian tersebut dengan peneliti ialah menjelaskan siapa saja yang menjadi pendiri PSI sehingga lolos verifikasi faktual dengan ketentuan dan syarat tertuang pada undang-undang nomor 32 tahun 2015 tentang partai politik dan peraturan mentri hokum dan HAM Nomor 57 tahun 2015 tentang tata cara

[16] Respository.usu.ac.id, tgl 17 Des 2018, 21;16

pendirian badan hokum, perubahan AD/ART serta pergantian kepengurusan partai politik.

G. Kerangka Pemikiran

Partai politi adalah salah satu komponen yang penting dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Partai politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan. Argumen seperti ini sudah biasa kita dengar di berbagai media masa dan dalam seminar-seminar yang kita ikuti khususnya yang membahasa tentang partai politik.

Secara etimologi politik berasal dari kata *polis* (yunani) yang berarti kota atau Negara. Kemudian diturunkan kata-kata *polities* yang berarti warga Negara, *politike te ckne'* berarti kemahiran politik dan politik episteme yang berarti ilmu politik. Secara istilah politik adalah usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita atau idiologi.[17]

Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dewasa ini partai politik sangat akrab dilingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah yang cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik

---

[17] Soelistyati Ismail Gami, *penghantar ilmu politi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984) h, 14

merupakan kehidupan yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi Negara. Dan ia baru ada di Negara modern.

Banyak sekali definisi mengenai partai politik yang dibuat oleh para sarjana. Di bagian ini dipaparkan beberapa contoh definisi yang dibuat para ahli ilmu klasik dan kontemporer, sebagai berikut;

1. Carl J.friedrich menuliskan bahwa ; "partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil (*A political, party is a grub of human beings, stably organized with the objective of secur*ing *or maintaining for its leaders the control of a government, with the futher objective of giving to members of the party, though such control ideal and material benefits and advantages*)"
2. Sigmund Neuman dalam buku karyanya, *Modern political parties*, "mengemukakan partai politik adalah organisasi aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui pesaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai padangan

berbeda ,(*A political party is the articulate organization pf society's active political agents: those who are concerned with the control pf governmental polity power, and who compete for popular support with other group holding divergent views).*

Menurut Neuman, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideology sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi.

Ahli lain juga turut merintis studi tentang kepartaian dan membuat definisinya adalah Giovanni Sartori, yang karya nya juga menjadi klasik serta acuan penting. Menurut Sartori:

Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umam dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menepatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.[18]

Selama 1998, di tengah-tengah euphoria masa reformasi, muncul gairah massal, khususnya dilingkungan berbagai kelompok kalangan kelas menengah, untuk aktif terlibat dalam partai-partai baru. Gairah ini menyebabkan publik Indonesia menjadi semarak, dan kita menyaksikan partisipasi publik yang luas melalui partai politik yang baru. Kegairahan semacam itu tidak terjadi pada masa Orde Baru yang terkenal piawai dalam memasung kehidupan kepartaian, menurut Santoso Ialah adalah

---

[18] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*… h.397-405

yang termaksud di antara mereka yang ketika itu percaya bahwa partai-partai politik pasca-Orde Baru dapat mewujudkan impian-impian mengenai perubahan politik di Indonesia.[19]

Timbulnya organisasi partai politik sehingga mencapai jumlah yang lebih dari 140 buah, serta menurut *jawa pas* tanggal 18 Februari 1999 ini telah mendaftarkan kepada panitia pendaftaran di Departemen kehakiman berjumlah 107 organisasi partai politik dan 71 organisasi telah dinyatakan memenuhi syarat atau lolos, serta kemudian 48 organisasi partai yng mengikuti pemilu 1999, adalah mengagumkan sekaligus memperihatinkan. Namun hal itu disebabkan karena perubahan kondisi politik akibat gerakan reformasi, banyaknya organisasi partai politik itu ditimbulkan pula oleh semangat yang menggelora untuk dapat ikut membangun bangsa dan Negara Republik Indonesia yang kita cinta ini.

Kepahitan masa silam dan kegairahan untuk membangun bangsa dan Negara telah membuat perilaku anggota masyarakat Indonesia bersifat utilitaristis. Jeremy Bentham memang mengatakan bahwa "*nature has placed ma nkind under the governance of two souvereign masters: pain and pleasure".*

Demikianlah, maka organisasi partai poitik tumbuh bagai jamur di musim hujan dengan tujuan ikut membangun

---

[19] A.E Priyono Stanley Adi Prasetyo, *Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto*,(Jakarta: PT Sembrani Aksara Nusantara 2003), h. 636

pemerintahan dan Negara yang bermanfaat bagi rakyat. Apakah yang dimaksud dengan ideologi partai politik, ialah ide mengenai masyarakat dan Negara ini disusun, pemerintahan yang bagaimana akan diselenggarakan, dan yang diperjuangkan terus menerus oleh organisasi yang dinamakan organisai partai politik itu. Oleh karena itu ide tentang bentuk Negara, Negara federal ataukah Negara kesatuan, pemerintah ayang jujur, transparan dan efisien serta beretika, kehidupan masyarakat yang berkelurgaan dan lain sebagainya, yang diperjuangkan oleh organisasi partai politik haruslah jelas dan diterima oleh rakyat.[20]

Bagi mereka yang berkecimpung dalam stadi perbandingan politik, telah mengenai partai politik merupakan salah satu menu utama. Dewasa ini, sulit membayangkan adanya Negara modern tanpa eksistensi partai politik. Partai politik bukan hanya berperan sebagai saluran aspirasi politik berbagai kelompok masyarakat dan sebagai wahana untuk mengartikulasikan tuntutan politik dalam sistem politik secara keseluruhan, tetapi juga berfungsi sebagai satu-satunya jenis organisasi yang berkompotisi untuk membentuk kabinet pemerintahan. Singkatnya, tak ada Negara modern tanpa adanya partai politik.

Partai politik, menurut Duverger, bukanlah sebuah komunitas melainkan kumpulan dari komunitas-komunitas. Sebagai

---

[20] Soernarko Setyodarmodjo,*Organisasi Partai Politik dan Demokrasi , Msyarakat Kehidupan dan Politik,* (Th XIII, No 1, Januari 2000), h. 87-94

kumpulan dari komunitas-komunitas, didalam tubuh partai politik hadir berbai kelompok kecil masyarakat yang menyebar ke berbagai kelompok wilyah geografis suatu Negara dalam bentuk kaukus, cabang-cabang partai, atau asosiasi lokal pendukung partai. Berbagai komunitas ini kemudian dirangkai menjadi satu ke dalam kekuatan koordinatif institusi. Duverger mengajukan dua tipe partai politik, baik berdasarkan struktur organisasi maupun berdasarkan tujuan ideologi politik.

Pertama, adalah tipe *"kaukus"* atau partai kader. *"kaukus"* adalah istilah untuk menggambarkan perannya kelompok, komite, atau klik tertentu dimana desentralisasi menjadi jiwa dalam pengelolaan partai. Partai politik dengan tipologi demikian tidak berupaya untuk memperbanyak jumlah anggotanya. Partai ini hanya memiliki sejumlah anggota yang kecil dan terbatas. Tidak ada propaganda untuk rekrurtmen anggota, bahkan partai bersifat tertutup dan sangat selektif dalam menerima anggota baru. Para aktivis partai direkrut secara *co-optation* dan *formal nomination*, tidak melalui registrasi secara terbuka untuk semua orang. Meskipun kecil jumlah anggotanya, partai kader sesungguhnya memiliki kekuatan yang bersumber bukan dari kuantitas merupakan dari kualitas anggota. Partai semacam ini merupakan kumpulan orang-orang terkemuka (*notable*) yang disegani secara politik.

Kedua adalah partai *"cabang"* atau partai *''massa''*. Menurut Duverger partai *"cabang"* kurang desentralistik dibandingkan dengan *"kaukus"*. Partai tipe ini mencari anggota sebanyak-banyaknya. Bagi partai masa, yang penting bukan kualitas tapi kuantitas anggota. Bukan I*co-optation* yang menjadi cara dalam rekrutmen anggota, melaikan *wide oven to all people*. Massa merupakan lahirnya dari sosialisme yang berfungsi memberikan pendidikan politik bagi kelas kerja.[21]

Ada dua hal yang penting saat kita membicarakan eksistensi partai baru. Pertama, aspek konstitusionalitas terkait dengan pasal 28E ayat (3) UUD 19945 yang menegaskasn bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya. Artinya, dari aspek hak konstitusional, siapapun berhak mendirikan partai jika memenuhi syarat-syarat sebagaimana di atur oleh Undang-undang. Pada posisi ini, apapun motifnya, usaha mendirikan partai baru tidak bisa dihalang-halangi. Usaha mereka harus diletakkan pada bingkai sistem politik Indonesia yang multipartai. Kedua, aspek dinamika politik menyangkut pemosisian eksistensi partai, transformasi politik figur, konsolidasi basis struktur partai yang akan mencerminkan daya tahan partai secara kelembagaan.[22]

---

[21]Maruto MD & Anwari WMK, *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat,* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2002), h. 93-95

[22] Gun Gun Heryanto,*Problematika Komunikasi Politik,* (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional KDT, 2018),h. 212

Teori partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dimana partai politik adalah suatu kelompok terorgansir yang anggota-anggotanya mempunyai otoritas , nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Partai politik adalah unsur penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Partai politik menghubungkan masyarakat madani dengan Negara dan lembaga-lembaganya. Selain itu, partai menyuarakan pandangan serta kepentingan berbagai kalangan masyarakat.[23]

Partai politik sebagai institusi utama dalam proses pengisian jabatan publik dalam sistem demokrasi memerlukan anggota sebagai basis organisasi kepartaian. Rekrutmen anggota menjadi sebuah fase awal terbentuknya kelembagaan partai. Rekrutmen anggota menjadi nilai penting karena anggota menjadi basis legitimasi partai politik. Anggota juga merupakan kanal penghubung partai politik dengan masyarakat. Untuk menggerakkan roda organisasi, anggota partai juga memiliki kemampuan menjadi pengurus dan kandidat pejabat publik. Disisi lain, anggota juga menjadi sumber pendanaan partai melalui iuran rutin yang di tetapkan. Selaras dengan ruh partai yang aktif dalam kompotisi memperoleh kekuasaan, proses tersebut akan sangat dipengaruhi dengan dukungan suara dari anggota dan kemampuan anggota untuk mempengaruhi dan mengerhkan

[23] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik...* h.160

dukungan masyarakat pada partai yang didukungnya. Rekrutmen politik didefinisikan sebagai sebuah proses mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai .[24]

Pendapat lain yang disampaikan oleh Ramlan Surbakti menyebutkan bahwa rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan mengangkat seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.[25]

Kaderisasi atau pelatihan elit politik merupakan pelatihan atau pembekalan terhadap elit politik yang prospektif untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Berbagai materi pelatihan dapat meliputi pemahaman tentang demokrasi, dan prinsip-prinsip partai, serta berbagai persoalan strategi yang dihadapi bangsa dan pilihan-pilihan kebijakan.[26]

Partai politik sebagai salah satu sarana pendidikan politik yang dapat mengadakan perubahan atau pembangunan politik. Objek perubahan atau unsur politik yang biasanya diobservasi oleh ilmuwan politik ialah sistem politik, struktur kekuasaan,

---

[24] Miriam Budiardjo,*penghantar Ilmu Politik,*(Jakarta: Universitas Terbuka 2000), h.164

[25] Ramlan surbakti, Mehami *Ilmu Politik,*(Jakarta: Gramedia Widya Sarana 2010),h. 150

[26] Soernarko Setyodarmodjo,*Organisasi Partai Politik dan Demokrasi , Msyarakat Kehidupan dan Politik… h.88*

strategi penanganan permaslahan kebijakan umum dan lingkungan masyarakat (kondisi-kondisi sosial-budaya, ekonomi, teknologi) dan fisik (sumber daya alam) yng mengaruhi dan mempengaruhi oleh system politik.[27]

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.[28]

1. Pendekatan Penelitian

   Metode analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan, metode kualitatif sebagai prosedur penilaian yang menghasilkan data

---

[27] Lembaga yang dapat disebut sebagai mesin politik formal atau resmi, yang dengan abash mengidetifikasikan berbagai masalah ,menentukan menjalankan segala keputusan yang mengikat seluruh anggota masyarakat untuk mencapai kepentingan umum.

[28] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, Cet III), h. 42.

deskriptif beruapa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.[29]

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, yuridis sosiologis adalah penelitian hokum yang menggunakan data skunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektifitas suatu undang-undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan variabel (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari stadi dokumen, pengamatan (observasi) dan wawancara (interview).

3. Tempat dan Waktu

Penelitian dilakukan di wilayah administrasi Kota serang, sedangkan untuk waktu penelitian ini selama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data yang akurat sehingga dapat dipertanggung jawabkan sebagai

---

[29] Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat, Lexy J Moloeng. Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 62*

suatu penelitian sosial yang ilmiah. Adapun data yang akan dikumpulkan dalam upaya pengumpulan data dibagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari wawancara langsung yang dilakukan penulis dnegan Partai Solidaritas Indonesia yang terlibat dalam proses pemenangan Budi Hartono dalam mengumpulan data yang akurat dan benar.

b. Data Sekunder

Data skunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang antara lain mengumpulkan buku-buku, koran, majalah, yang diteliti oleh penulis untuk melengkapi kekuatan dari data primer.

5. Teknik Analisis Data

Data yang sudah diperoleh kemudian diolah dan dijelaskan menggunakan teknik analisis deskriptif. Penelitian deskriptip adalah suatu penelitian yang diupayakan untuk mencedera atau mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat objek tertentu.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini penulis membagi ke dalam 5 (lima) bab dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, yakni sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluhan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan

Bab II. Kondisi objektif Partai Solidaritas Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah.

Meliputi: Sejarah Partai Solidaritas Indonesia DPW Banten, Letak Geografis kantor PSI DPW Banten, Visi dan Misi Partai Solidaritas Indonesia, Struktur Organisasi Partai Solidaritas Indonesia DPW Banten, Sumber Dana Partai Solidaritas Indonesia.

Bab III. Kajian Pustaka tentang Partai Politik dan perekrutmen anggota parati politik.

Meliputi : sejarah dan pengertian Partai Politik, macam-macam partai politik, dasar hukum partai politik, tujuan dari partai politik, rekrutmen keanggotaan partai politik.

Bab IV.Langkah-langkah Partai Solidaritas Indonesia DPW Banten dalam merekrut keanggotaan : Meliputi : Mekanisme perekrutan keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia, latar belakang lahirnya Partai Solidaritas Indonesia, strategi Partai

Solidaritas Indonesia mengusung anggota partainya untuk menjadi calon anggota legislatif.

Bab V. Penutup, meliputi : kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
KONDISI OBYEKTIF PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
DEWAN PIMPINAN WILAYAH BANTEN

A. Sejarah PSI DPW Banten

Berawal obrolan santai tapi berkualitas dan visioner lima anak muda di sebuah kafe di bilangan Jakarta Selatan pada akhir 2014 menjadi awal cikal bakal terbentuknya Partai solidaritas Indonesia (PSI).[30] PSI adalah partai politik yang didirikan setelah Pemilu 2014. Partai ini menyelenggarakan Kopi Darat Nasional (KopDarNas) perdana di Jakarta pada 16 November 2015.[31] Ada dua dasar hukum yang dijadikan pendoman pendirian partai, yakni Undang-undang Partai Politik Nomor. 2 Tahun 2011, peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2011 tentang persyaratan pendirian partai politik. Oleh karena itu, PSI harus mengikuti 2 (dua) tahapan. Tahapan pertama, verifikasi kementrian hukum dan HAM untuk memperoleh status badan hukum telah terdaftar sebagai partai politik yang berhak lolos menjadi peserta pemilu,

Kementrian Hukum dan HAM akan melakukan dua tahapan pemeriksaan, *tahapan Pertama* adalah verifikasi administrasi terhadapan kelengkapan dokumen persyaratan pendirian partai politik. *Tahapan kedua,* adalah verifikasi factual

---

[30] http://www.tribunnews.com/nasional/2018/02/25/pembentukan-partai-psi-berawal-dari-obrolan-di-kafe diakses pada tanggal 19 Desember 2019.

[31] https://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/1212451/psi-grace-natalie-dan-citra-partai-anak-muda. diakses pada tanggal 19 Desember 2019.

untuk melakukan penyesuaian atau kecocokan dokumen administrasi dengan fakta lapangan.

Sedangkan sejarah masuknya PSI ke Provinsi Banten lewat jaringan pimpinan pusat Raja Juli Antoni sebagai sekertetaris ada juga dari aktivis Muhammadiyah Misbahul Hayar dan Muhammad Riyado untuk membawa PSI ke Porovinsi Banten ia menjadi sekretaris dan wakil sekretaris. Dari situlah mulai dibentuk pengurusan wilayah maka harus juga membentuk kepengurusan daerah Kabupaten/kota, harus 75% dibanten sendiri dari delapan Kabupaten/kota artinya harus terbentuk minimum enam Kabupaten/kota, tetapi ya Alhamdulilah kita membentuk sudah sampai 100% pada tahap Verifikasi KPU walaupun hanya 75% tapi kita memaksimalkan 100%. Sama halnya ditiap-tiap kabupaten/kota diminta paling sedikit membentuk 50% ditingkat kecamatan ada juga yang sampai 100% bahkan di pandeglang sendiri dari 35 kecamatan itu terbentuk 33 kecamatan yang mempunyai pengurus. [32]

Kelengkapan dokumen administrasi yang akan diperiksa adalah:

1. Verifikasi Administrasi Deawan Pimpinan Wilayah PSI
    a. Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah PSI. Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah wajib menyertakan 40% keterwakilan perempuan,

[32] Hasil Wawancara Dengan Bapak Budi Harto, *ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Banten,* Pada Tanggal 11 Januari 2019. Waktu 14:09 WIB

b. Surat keterangan dari kesbangpol provinsi yang menyatakan bahwa kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah PSI telah melaporkan keberadaannya atau terdaftar di kesbangpol.
c. Foto copy kartu penduduk yang dinyatakan sesuai aslinya oleh pejabat yang menandatangani KTP (atau setingkat diatasnya), pengadilan negeri, atau notaris atas nama sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang fungsionaris utama yaitu, ketua, sekretaris dan bendahara umum.
d. Kantor tetap yang tidak berubah sampai tahapan akhir pemilu 2019 dan harus berkedudukan di Ibu kota Provisi.
e. Surat keterangan domisili kantor Dewan Pimpinan Wilayah PSI yang dikeluarkan oleh Lurah/kepala Desa.
f. Bukti sah status kantor Dewan Pimpinan Wilayah PSI baik berupa Sertifikat jika hak milik sendiri, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam atau bentuk perjanjian lainnya sekurang-kurangnya sampai dengan akhir tahapan pemilu 2019. Dokumen status kantor harus dilegalisir oleh Notaris.
g. Surat pernyataan bermaterai setiap pengurus yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar pengurus

dari partai PSI dan tidak menjadi pendiri, pengurus atau anggota partai lain.

h. Kantor tetap Dewan Pimpinan Wilayah PSI harus memnuhi standar verifikasi yaitu, papan nama kantor, meja kerja ketua, sekretaris dan bendahara. Ruang rapat pimpinan, foto presiden dan wakil presiden, lambing Burung Garuda, Bendera merah puth, bendera partai, stempel partai, kop surat partai, alat tulis kantor, buku surat masuk dan keluar, box file dan bindex file.

2. Verifikasi Administrasi Dewan Pimpinan Daerah PSI

a. Surat Keputusan (SK) kepengurusan dewan pimpinan daerah PSI. kepengurusan dewan pimpinan daerah wajib menyertakan 40% keterwakilan perempuan.

b. Surat keterangan dari Kesbangpol Kabupaten/kota yang menyatakan bahwa kepengurusan dewan pimpinan daerah PSI telah dilaporkan keberadaannya atau telah terdaftar di kesbangpol.

c. Foto copy kartu penduduk yang dinyatakan sesuai aslinya oleh pejabat yang menandatangi KTP (atau setingkat diatasnya), pengadilan negeri, atau notaris atas nama sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dungsionaris utama yaitu, ketua, sekretaris dan bendahara umum.

d. Kantor tetap yang tidak berubah sampai tahapan akhir pemilu 2019 dan harus berkedudukan di Ibu kota Provisi.
e. Surat keterangan domisili kantor Dewan Pimpinan Wilayah PSI yang dikeluarkan oleh Lurah/kepala Desa.
f. Bukti sah status kantor Dewan Pimpinan Daerah PSI baik berupa Sertifikat jika hak milik sendiri, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam atau bentuk perjanjian lainnya sekurang-kurangnya sampai dengan akhir tahapan pemilu 2019. Dokumen status kantor harus dilegalisir oleh Notaris.
i. Surat pernyataan bermaterai setiap pengurus yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar pengurus dari partai PSI dan tidak menjadi pendiri, pengurus atau anggota partai lain.
j. Kantor tetap Dewan Pimpinan Daerah PSI harus memnuhi standar verifikasi yaitu, papan nama kantor, meja kerja ketua, sekretaris dan bendahara. Ruang rapat pimpinan, foto presiden dan wakil presiden, lambing Burung Garuda, Bendera merah puth, bendera partai, stempel partai, kop surat partai, alat tulis kantor, buku surat masuk dan keluar, box file dan bindex file.

3. Verifikasi Administrasi Dewan Pimpinan Cabang PSI
   a. Surat Keputusan (SK) kepengurusan dewan pimpinan Cabang PSI. kepengurusan dewan pimpinan daerah wajib menyertakan 40% keterwakilan perempuan.
   b. Surat keterangan dari dari kecamatan yang menyatakan bahwa kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang PSI telah dilaporkan keberadaannya atau terdaftar di kecamatan.
   c. Foto copy kartu penduduk yang dinyatakan sesuai aslinya oleh pejabat yang menandatangi KTP (atau setingkat diatasnya), pengadilan negeri, atau notaris atas nama sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dungsionaris utama yaitu, ketua, sekretaris dan bendahara umum.
   d. Kantor tetap yang tidak berubah sampai tahapan akhir pemilu 2019 dan harus berkedudukan di Ibu kota Provisi.
   e. Surat keterangan domisili kantor Dewan Pimpinan cabang PSI yang dikeluarkan oleh Lurah/kepala Desa.
   f. Bukti sah status kantor Dewan Pimpinan cabang PSI baik berupa Sertifikat jika hak milik sendiri, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam atau bentuk perjanjian lainnya sekurang-kurangnya sampai dengan akhir tahapan pemilu 2019. Dokumen status kantor harus dilegalisir oleh Notaris.

g. Surat pernyataan bermaterai setiap pengurus yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar pengurus dari partai PSI dan tidak menjadi pendiri, pengurus atau anggota partai lain.
h. Kantor tetap Dewan Pimpinan cabang PSI harus memnuhi standar verifikasi yaitu, papan nama kantor, meja kerja ketua, sekretaris dan bendahara. Ruang rapat pimpinan, foto presiden dan wakil presiden, lambing Burung Garuda, Bendera merah puth, bendera partai, stempel partai, kop surat partai, alat tulis kantor, buku surat masuk dan keluar, box file dan bindex file.

B. Letak Geografis Kantor PSI DPW Banten

Letak geografis Kantor PSI Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Banten terletak di Kota Serang Ruko Citra Land Puri Blok B9 No.15 Jl. lingkar Selatan-Ciracas-Serang-Banten.[33]

C. Visi Dan Misi Partai Solidaritas Indonesia

Visi Partai Solidaritas Indonesia

Indonesia yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat.

Misi Partai Solidaritas Indonesia

1. Menggalang kekuatan nasional melalui sebuah kepemimpinan politik yang ideologis, terorganisir dan terstruktur.

[33] Hasil Wawancara Dengan Bapak Budi Harto, *ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Banten,* Pada Tanggal 11 Januari 2019. Waktu 14:09 WIB

2. Menggalang perjuangan politik dengan nilai solidaritas nasional melanjutkan agenda reformasi dan demokratisasi.
3. Membangun kembali semangat republikanisme, merajut kembali rasa kebangsaan yang terserak, menanam kembali benih-benih idealisme, mendirikan kembali benteng-benteng kebhinekaan dan membangun kembali pondasi gotong royong.
4. Mendorong martabat Indonesia dalam pergaulan internasional, sesuai prinsip politik bebas aktif dengan melihat geopolitik internasiaonal yang sedang berkembang.[34]

D. Struktur Organisasi Partai Solidaritas Indonesia DPW Banten

Sunan Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia Pusat

Ketua Dewan Pembina	:	Jeffrie Geovanie
Sekretaris Dewan Pembina	:	Sunny Tanuwidjaja
Ketua Mahkamah Partai	:	Albert Aries
Sekretaris Mahkamah Partai	:	Fenty Noverita Indrawaty
Anggota	:	Fetty Retnofati senjaya
Anggota	:	Gatot goei
Ketua Umum	:	Grace Natalie Louisa
Ketua I	:	Sumardy
Ketua II	:	Tsamara Amany

[34] Ad/art Partai Solidar Indonesia

Ketua III	:	Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka
Sekretaris Jendral	:	Raja Juli Antoni
Wakil Sekretaris Jendral	:	Satia Chandra Wiguna
Wakil Sekretaris Jendral	:	Dank Eka Rahmaningtyas
Bendahara Umum	:	Suci Mayang Sari
Wakil Bendahara	:	Lila Zuhara.[35]

Susunan Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia DPW Banten

Ketua	:	Budi Hartono
Wakil Ketua	:	Pepen Efendi
Wakil Ketua	:	Ila Rihlatul Janah
Sekretaris	:	Muhammad Hafiz Ardianto
Wakil Sekretaris	:	Indra Dita Puspita
Bendahara Umum	:	Yuni Aryani
Wakil Bendahara	:	Asih Sunarsih.[36]

E. Sumber Dana Partai Solidaritas Indonesia

Kekayaan Partai diperoleh dari:

1. Iuran Wajib.
2. Sumbangan tetap atau tidak tetap dari masyarakat/lembaga/badan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.

---

[35] Lampiran,keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia, Nomor M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2017

[36] Lampiran, Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Wilyah, Nomor: 449/SK/DPP/2017

3. Sumbangan, wakaf, wasiat, dan hibah lainnya dialihkan atas nama partai.[37]

Sumber dana pertama dilakukan saring Income itu dari kepengurusan tetapi yang paling massif kita lakukan penggalangan dana melalui kartu sakti (kartu soidaritas anti korupsi dan anti intoleransi), lauching pertama kartu sakti itu kita mendapatkan 2 Miliar gunanya kartu sakti selain bisa digunakan sebagai pembayaran elektronik contoh seperti E-tol dan setiap yang memberika donasi melalui kartu sakti itu kisaranya dari Rp.25.000,- sampai 1 Miliar dengan kata gori tertentu. Untuk Rp.25.000,- hanya bisa masuk dengan sistem yang kita punya Misalnya: "si A berdonasi dia hanya menerima User Id dan Password" untuk masuk ke teman PSI disana donatur bisa berkomentar memberikan penilaian untuk terhadap anggota dewan yang duduk di parlemen dengan sistem yang kita buat.dari donasi kartu sakti yang kita galang itu di DPW Banten mendapatkan paling besar Rp.10.000.000,- Dan kita buka Toko Solidaritas sama halnya seperti buka-lapak disana ada attribute PSI lainnya, toko solidaritas sebetulnya toko kita bersama misalkan ada seorang kader, pengurus yang mempunyai produk dia bisa memasarkan produk itu dengan sistem yang kita punya di toko solidaritas itu tentunya dengan saring Income tadi keuntungan untuk PSI berapa dan keuntungan Penjual berapa.[38]

---

[37] Ad/art Partai Solidaritas Indonesia

[38] Hasil Wawancara Dengan Ibu Aryani, *Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Banten,* Pada Tanggal 11 Januari 2019. Waktu 14:09 WIB

BAB III
TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Partai Politik

Menurut Joseph Laparombara & Myron Weiner (1996), ada tiga teori yang dapat menjelaskan asal-usul dan pertumbuhan partai politik. *Pertama,* teori kelembagaan yang melihat ada keterhubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. *Kedua,* teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. *Ketiga,* teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.

Teori yang pertama, partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif (dan eksekutif) karena ada kebutuhan para anggota parlemen. (yang ditentukan dengan berdasarkan pengangkatan) untuk mengadakan kontrak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat. Setelah partai politik itu terbentuk, dan menjalankan fungsinya, maka muncul partai politik lain yang dibentuk oleh masyarakat. Partai politik yang terakhir ini biasanya dibentuk oleh kelompok-kelompok kecil pemimpin masyarakat yang sadar politik berdasarkan penilaian bahwa partai politik yang dibentuk pemerintah tidak mampu menampung dan memperjuangkan kepentingan mereka. Hal ini tidak dapat ditemui dalam wilayah atau bangsa yang tengah dijajah yang

membentuk partai politik sebagai alat memobilisasi massa untuk memperjuangkan kemerdekaan, akan tetapi dapat juga ditemui dalam Negara maju, dalam mana kelompok masyarakat yang kepentinganya kurang terwakili dalam sistem kepartaian yang ada membentuk partai sendiri seperti partai buruh di Inggris dan di Australia dan Hijau di Jerman.

Teori yang kedua, menjelaskan bahwa krisis Historik, terjadi manakala suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk masyarakat tradisional yang bersruktur sederhana, menjadi masyarakat yang modern yang bersruktur kompleks. Pada situasi ini terjadi berbagai perubahan-perubahan seperti misalnya pertumbuhan jumlah penduduk karena perbaikan fasilitas kesehatan, perluasan pendidikan, mobilitas okupasi, perubahan pola pertanian dan industri, partisipasi media massa, urbanisasi perubahan ekonomi dan berorientasi pasar, peningkatan aspirasi dan harapan-harapan baru dan munculnya gerakan popuslis.

Perubahan-perubaha tersebut menimbulkan tiga macam krisis, yaitu krisis legitimasi, krisi intergrasi dan krisis partisipas. Artinya, perubahan-perubahan yang mengakibatkan masyarakat mempertanyakan prinsip-prinsip yang mendasari klgitimasi kewenangan pihak yang memerintah menimbulkan masalah dalam indentitas yang menyatukan masyarakat.

Teori ketiga, melihat modernisasi sosial ekonomi, seperti pembangunan ekonomi, seperti pembangunan teknologi

komunikasi media massa dan transportasi, perluas dan peningkatan pendidikan, indrustialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan Negara seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok-kelompok kepentingan organisasi. Partai politik merupakan produk logis dari pada modernisasi sosial ekonomi.[39]

Partai sebagai kekuatan politik adalah suatu gejala baru bagi semua Negara di dunia ini, dalam arti bahwa umurnya tidak setua umur masyarakat manusia. usianya tidak lebih dari 100 tahun. Istilah partai politik itu sendiri baru muncul pada abad Sembilan belas dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga Pimpinan dan meningkatnya frekuensi pemilihan umum dan meluasnya hak mereka yang bisa mengambil bagian dalam pemilihan umum. Pada tahun 1850 tidak ada satu Negara pun di dunia (kecuali Amerika Serikat) mengenal partai dalam pengertian modern. Ada alur-alur pendapat, kelompok-kelompok rakyat, masyarakat-masyarakat yang dikelompokan karena memiliki aliran filsafati tertentu, ada kelompok-kelompok didalam parlemen, tetapi belum ada partai politik dalam arti yang sebenarnya. Namun menurut catatan banyak ahli pada tahun 1950-an hamper semua *nation-states* di dunia sudah memiliki partai politik, dan bagi kebanyakan Negara-negara jajahan partai-partai politik menarik perhatiannya karena partai politik bisa menjadi kekuatan tandingan menentang penjajahan. Karena itu

---

[39] Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.185-186

banyak Negara yang muncul mencita-citakan partai, dan kepadanya para warga menggantungkan harapan.

Dalam hubungan itu Jean Blondel membuat suatu studi perbandingan yang menarik tentang partai-partai di seluruh dunia.

Tabel 1. Jumlah Negara yang tak berpartai, satu partai dan banyak partai menurut wilayah.

Wilayah	*Tanpa Partai*	*Satu Partai*	*Banyak Partai*	*Total*
Atlantik	1	2	20	23
Eropa Timur & Asia Utara	0	13	0	13
Timur Tengah	10	6	5	21
Asia Selatan & Tenggara	9	3	7	19
Afrika Subsahara	9	20	9	38
Amerika Latin	2	5	17	24
Total	31	49	58	138
Presentase	23	34	43	100

Tabel ini mengungkapkan kenyataan bahwa sampai dengan tahun 1974 ada 31 negara kebangsaan (*nation- state*) yang tidak memiliki partai politik sama sekali atau sebanyak 23 persen. Dari tabel tersebut juga bisa dilihat bahwa bagian terbesar

dari kelompok yang tidak memilik partai adalah Negara-negara timur tengah yang memiliki sistem kerajaan atau emirat, yang diwariskan secara turun temurun. Bagi Indonesia sendiri kehidupan partai politik baru dapat dilacak kembali secara samar-samar sampai tahun 1908, dikatakan karena organisasi-organisasi yang memberi kesan adanya partai politik, dalam kenyataannya bukan partai dalam pengertian moderen. [40]

Kehidupan partai politik di Indonesia diawali dari masa colonial sebagai suatu bentuk manifestasi kebangkitan kesadaran nasional. Kehidupan partai politik pada masa colonial yeng cenderung beragam diteruskan setelah kemerdekaan dan pemilihan umum pertama sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 7 tahun 1953 diikututi 118 partai politik.[41] Dalam sejarah kepartaian dari zaman penjajahan Belanda hingga era reformasi, telah diterapkan beberapa sistem kepartaian, yaitu sistem multipartai di masa jajahan Belanda, sistem tanpa partai dimasa pendudukan jepang, sistem partai tunggal (partai Negara) segera setelah proklamasi kemerdekaan 1945, kembali lagi ke sistem multipartai terbatas, yang terbagi dalam sistem 10 partai di masa Demokrasi terpimpin atau Orde Lama dan awal orde baru (1959-1973) dan sistem tiga partai di masa Orde Baru (1973-

---

[40] LP3ES, *Analisa Kekuatan Politik Di Indonesia,* (Jakarta: Anggota IKAPI , 1985), h. 189-191

[41] Andy Ramses M La Bakry, *Politik dan Pemerintahan Indonesia… h. 149*

1998), serta kembali ke sistem multipartai terbuka sejak reformasi politik tahun 1998 hingga sekarang.[42]

Sejarah munculnya partai-partai politik di Negara yang satu dengan Negara yang lainnya memang tidak selalu sama. Akan tetapi ada satu benang merah yang mempertemukannya, yaitu bahwa kemunculan partai-partai politik itu berbanding lurus dengan tumbuhnya proses demokras, khususnya yang berikatan erat dengan kesamaan hak antar warga Negara. Karena itu partai politik merupakan satu pilar dari demokrasi yang harus ada disebuah Negara modern.[43]

Timbulnya sejarah partai politik diawali dari permulaan usaha menyusun pemerintahan sentral Republik yang didasarkan atas pasal-pasal I – IV aturan peralihan UUD 1945, dan dengan dikeluarkannya Maklumat pemerintahan RI tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran mendirikan partai politik dalam rangka memperkuat kemerdekaan.

Pasal 1 aturan peralihan UUD 1945, menunjuk panita persiapan kemerdekaan sebagai Organ yang mengatur dan menyelenggarakan pemindahan kekuasaan pemerintah dari pemerintahan militer jepang kepada pemerintahan Republik Indonesia. [44]

---

[42] Athifa Ramadhani, "Kedudukan Hukum Partai Politik Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Knstitusi" (skripsi, Program Sarjana Universitas Hasanudin Makasar, 2015), h.47

[43] Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*,.. h.187

[44] Poerwantana, *Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta 1994), h. 25-26

Dalam sejarah yang panjang, peran pemuda dalam perpolitikan Indonesia telah mengalami dialektika dengan berbagai konteks sosiokultural yang dihadapinya, jauh sebelum Indonesia merdeka, pemuda telah memperlihatkan partisipasi politik yang tinggi sebagai manifestasi dari keinginan untuk membebaskan diri dari belenggu kolonialisme dan imperialism Barat. Peran pemuda dalam politik Indonesia abad ke-20 merupakan fenomena khas Masyarakat Nusantara atau wilayah-wilayah yang tengah berjuang dalam kolonialisme . memotret peran dan partisipasi politik kaum muda dalam pentas politik Indonesia sangat penting bagi upaya mencari jalan masukbagi upaya memahami eksistensi politik kaum muda. Kini wancana pemimpin muda mencuat kembali dalam politik Indonesia, meski sebenarnya eksistensi politik kaum muda menunjukan grafik meningkat seiring dengan iklim politik yang semakin terbuka dan demokratis.[45]

Di tengah ingar-bingar persiapan pemilihan umum 2004, terkadang muncul pertanyaan; mengapa pemilu kali ini dianggap amat penting dan mungkin lebih penting daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Salah satu jawaban, inilah pertama kalinya diadakan pemilihan umum secara langsung pada berbagai tingkat pemilihan. Memang ada keterbatasan dalam tingkat "keterbatasan" ini, yang disebabkan oleh persyaratan calon-calon

---

[45] Syarifuddin Jurdi,*Kekuatan-kekuatan Politik Indonesia, (Jakarta, kencana 2016), h. 272-273*

legislative serta calon wakil presiden. Misalnya, tidak semua partai politik berhak mengajukan calon presiden dan wakil

presiden (sebagai suatu paket) untuk dipilih, karena masih bergantung pada besarnya konstituesnsiyang dipersyaratan. Menurutnya undang-undang No.23/2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, calon presiden dan wakil presiden hanya dapat dilakukan oleh partai politik atau koalisi yang sanggup memperoleh 15 persen dan jumlah kursi di DPR atau 20 persen suara dalam pemilihan umum untuk anggota DPR (pasal 5 ayat 4) dengan lain perkataan, sudah ada semacam "seleksi alamiah".[46]

B. Pengertian Partai Politik

Sebelum beranjak pada pengertian partai politik, maka perlu memahami maksud dari politik itu sendiri. Dari pemahaman yang beragam, maka peneliti melihat politik sebagai kegiatan mencari dan memmpertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Hal-ihwal yang menyangkut kekuasaan dalam masyarakat yakni sifat, hakikat, dasar, proses, ruang lingkup dan hasil-hasil kekuasaan.[47]

Kajian tentang partai politik dikembangkan oleh para pakar sejak kuartal ketiga abad ke-19. Selama periode itu

---

[46] Komaruddin Hidayat,Ignas Kleden,Muhammad Qodari,Denny J.A, *Pergulatan Partai Politik Di Indonesia,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 15-16

[47] Eki Sumantri, "Mekanisme Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Serang Dalam Menentukan Calon Bupati" (Skripsi Sarjana, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Banten, 2016),h.

terdapat berbagai kajian tentang partai politik, terutama sebagai respons terhadap cepatnya perkembangan peranan sebuah partai politik dipemerintahan.[48]

Mengikuti pandangan Giovanni Sartori, partai politik dapat dimaknai sebagai suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan public. Setelah memenangkan pemilu, partai politik diberi kesempatan duduk di legislative dan dapat mengendalikan pemerintahan dalam rangka untuk mengimplementasikan visi, misis, dan program kerjanya. Sartori mendefinisikan partai politik sebagai berikut; *"a party is any political group that present at elections and is capable of placing through election candidates for public office"* yang artinya, (partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonya untuk menduduki jabatan-jabatan public). Disamping itu, partai politik memiliki sejumlah fungsi yang dijalankan, antara lain fungsi representasi (Pimpinan), pemilihan pemimpin, pertimbangan-pertimbangan dan perumusan kebijakan serta kontrol terhadap pemerintah. Dengan fungsi yang dimilikinya, partai politik diberi

[48] Firman Noor, *Perpecahan & Solidaritas Partai Islam Di Indonesia Kasus PKB Dan PKS di DEKADE Awal Reformasi,* (Jakarta: KDT 2015), h. 9

keleluasaan untuk berjuang untuk kepentingan rakyat, nukan untuk kepentingan penguasa semata.[49]

Partai politik adalah kelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin parati dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materil dan idiil pada para anggotanya (Carl Fredrich).[50]

Partai politik merupakan salah satu wahana bagi warganegara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Sekalipun memiliki tendensi politis dan rawan akan hegemoni Negara, namun sebagai tempat berekspresi secara politik maka partai politik dapat dikatakan juga menjadi bagian tak terpisah dari pilar-pilar penegak *civil society*.[51] Partai politik sebagai instrument penting dari demokrasi yang diakui dan diatur eksistensinya oleh Negara berimplikasi kepada tanggung jawab dan fungsi yang dimiliki oleh partai politik untuk menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam penegakkan hak asasi manusia yang sudah diatur dalam UUD 1945.[52]

---

[49] Ujang Komarudin, *Ideologi Partai Politik,* (Jakarta: RMBOOKS, 2016), h.17-18

[50] Eman Hermawan, *Politik Membela Yang Benar,* (Yogyakarta: Yayasan Kajian Dan Layanan Informasi Untuk Kedaulatan Rakyat, 2001), h.69

[51] Nadiroh , *Prospek dan Tantangan Civil Society di Indonesia,* (Jakarta: Tsabit Latief 2008), h. 38

[52] Moh Mahfud MD & Imam anshori Saleh, *Parliamentary Threshold Dan HAM Dalam Hukum Tata Negara Indonesia* (Jawa Timur: Setara Pers 2014), h.39

C. HAM Dan Partai Politik Di Indonesia

1. Hak Asasi Manusia

Perkembangan zaman di era ini menuntut adanya jaminan akan peran Negara untuk menjaga hak asasi manusia atau HAM dalam kerangka Negara yang dikendalikan oleh humum (*rechtaat*) bukan dalam kontek Negara yang dikendalikan oleh kekuasaan (*machstaat*). Selama lebih dari 50 tahun sejak Indonesia merdeka, atau tepatnya dari tahun 1945 sampai tahun 1998 ketika terjadinya reformasi nasional (53 tahun sejak kemerdekaan) bidang ilmu hukum tata negara banyak dikaitkan dengan kajian-kajian politik termaksud kajian terhadap partai politik, HAM yang lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi karena Negara yang berdasarkan hukum yang dapat menjamin tegaknya hak asasi manusia dalam situasi dan kondisi yang terus berkembang.

Kekuatan dari perkumpulan merupakan bagian yang paling penting dalam menjamin dari hak-hak manusia, dengan perkumpulan politik manusia dapat memperjuangkan hak-hak politik dirinya dan hak-hak manusia lainnya. Hubungan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dengan partai politik terletak pada penetapan *Parliamentary Threshold* yang terdapat dalam UU pemilu. Indonesia banyak mengalami perubahan dalam fase-fase penegakan hak asasi manusia, dalam kaitan dengan berpolitikan, keberadaan partai politik memiliki peranan strategis untuk

menyuarakan hak asasi manusia juga mulai di derogasi oleh aturan normative dengan diberlakukannya *parliamentary threshold* (PT) yang secara subtansial akan berimplikasi kepada minimnya partai politik yang masuk ke dalam parlemen.[53]

2. Partai Politik Di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, munculnya partai-partai tidak lepas dari kebijakan pemerintahan kolonial Belanda yang menerapkan kebijakan politik elit. Kebangkitan partai-partai politik bagi bangsa Indonesia ternyata bahwa dalam kehidupan kepartaiannya, baru dapat dilacak kembali secara samar-samar sampai pada tahun 1908-an. Dikatakan demikian, karena organisasi-organisasi yang memberi kesan adalah partai politik, dalam kenyataannya bukanlah partai politik dalam pengertian modern sebagai organisasi yang tujuannya merebut kedudukan Negara di dalam persaingan pemilihan umum.[54] Partai politik di Indonesia pada awal mulanya berada dalam posisi ambivalen. Bagi partai-partai yang berprinsip *cooperatie* maka kedudukan politik dalam lembaga pemerintahan colonial menjadi cita-citanya. Sedangkan bagi partai-partai yang berprinsip *non-cooperatie*, kedudukan public bukan cita-citanya. Tetapi partai-partai tersebut menempatkan dirinya menjadi wahana mobilisasi massa, penyalur aspirasi menentang penjajahan. Namun lama kelamaan baik mengambil jalan *co* maupun yang *non-co*

---

[53] Moh Mahfud MD & Imam anshori Saleh, *Parliamentary Threshold Dan HAM Dalam Hukum Tata Negara Indonesia… h. 1-9*

[54] Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*,..h. 187

perkembangan menjadi kekuatan yang menantang yaitu melawan penjajahan belanda.[55]

Partai politik mempunyai posisi *(status)* dan peranan *(role)* yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga Negara. Tentu saja, partai politik merupakan salah satu saja bentuk pelembagaan sebagai wujud ekpresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Prose pelembagaan demokrasi itu pada pokoknya sangat ditentukan oleh pelembagaan organisasi partai politik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri.

Jika hal ini dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia, banyak sekali organisasi kemasyarakatan yang kepengurusannya masih sangat *personalized.* Jika kita menggunakan parameter "prsonalitas" ini untuk menilai organisasi kemasyarakatan dan partai-partai politik di tanah air dewasa ini, tentu banyak sekali organisasi yang dengan derajat yang berbeda-beda dapat dikatakan belum semuanya melembaga dari partai-partai yang ada di Indonesia.[56]

Lebih lanjut menyusul Maklumat Pemerintah 3 November 1945 tersebut, bertumbuh dan bertambah setiap kelompok yang ada dalam masyarakat itu belomba-lomba berdirikan partai

---

[55] LP3ES, *Analisa Kekuatan Politik Di Indonesia… h. 197*

[56] Jimly Asshiddiqie, *Penghantar Ilmu Hukum Tata Negara,* (Jakarta: rajawali Pers 2016), h.141-145

politik yang smapai bulan januari 1946, 10 partai politik besar antaranya terdapat, partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang didirikan pada tanggal 7 November, partai Buruh Indonesia (PBI) didirikan pada tanggal 7 november 1945, Partai rakyat Djelata (PRD), 8 November 1945, Partai sosialis Indonesia (PSI), 11 November 1945, Partai Kristen Indonesia (Parkiondo) 10 November 1945 Partai katolik republik Indonesia (PKRI) 8 November 1945, Persatuan Rakyat Mahraen Indonesia (permai) 17 Desember 1945, Partai Nasional Indonesia (PNI) 1 desember 1945.[57]

Di Negara-negara berkembang keadaan politik sangat berbeda satu sama lain: demikian pula keadaan partai politiknya menunjukan banyak sekali variasi. Kecuali di beberapa Negara yan berlandaskan komunisme, seperti korea utara.[58] Perjalanan kehidupan partai politik di Indonesia memberi gambaran bahwa empat masalah yang perlu dikaitkan kepada pembicaraan mengenai bagaimana partai politik mengorganisir dirinya. Unsur-unsur tersebut ialah, bagaimana hubungan antara partai dengan masyarakat pendukung partai, peranan ideologi di dalam kehidupan partai untuk memperoleh sarana materiil yang penting pula perannya bagi kelancaran perputaraan mesin partai.[59]

---

[57] Anthonius sitepu, *Studi Ilmu Politik…* h. 188
[58] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik…* h. 413
[59] Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia… h.23-24*

D. Dasar Hukum Partai Politik

Maklumat pemerintah 3 November 1945 itu menyebutkan bahwa atas dasar usul badan Pekerja (PB) Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI) kepada pemerintah agar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat (rakyat) untuk mendirikan partai-partai Politik. Dalam dictum Maklumat pemerintah 3 November 1945 itu yang ditanda tangani oleh wakil presiden Mohammad Hatta berbunyi sebagai berikut:

a. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai politik itulah dapat dipimpin ke jalan yang benar segala aliran/paham yang ada dalam masyarakat.
b. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelumnya diselenggarakan pemilihan umum bagi anggota-anggota Badan Pimpinan Rakyat pada Januari 1946.[60]

Lima UU Bidang pembangunan politik yang disahkan presiden dengan persetujuan DPR pada tahun 1985 ialah:

a. UU No.1 tahun 1985 tentang perubahan UU No. 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Pimpinan Rakyat sebagaimana diubah dengan UU No. 4 tahun 1975 dan UU No. 2 Tahun 1980.

---

[60] Anthonius sitepu, *Studi Ilmu Politik…* h. 188

b. UU No. 2 tahun 1985 tentang perubahan UU No. 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPD sebagaimana diubah dengan UU No. 5 tahun 1975.
c. UU No. 3 tahun 1985 tentang Perubahan UU No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
d. UU No. 5 tahun 1985 tentang Referendum.
e. UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan

Secara keseluruhan, lima UU Bidang pembangunan Politik itu merupakan pelaksanaan dari amanat rakyat Indonesia yang dituangkan kedalam:

a. Ketetapan MPR No. 1/MPR/1983 tentang Peraturan tata tertib MPR (dasar hukum UU No. 5 tahun 1985):

Pasal 104: *MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya murni dan konsekuen.*

Pasal 105 ayat 1: *apabila ada kehendak Anggota MPR untuk mengajukan usul perubahan UUD 1945, maka usul tersebut harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 4 Fraksi seutuhnya dengan daftar nama dan tanda tangan seluruh anggotanya.*

Pasal 106: *apabila kehendak untuk mengusulkan perubahan UUD 1945 sebagaimana*

dimaksud pasal 105 disetujui oleh MPR, maka MPR menugaskan presiden/mandataris untuk melaksanakan Referendum sesuai dengan Undang-undangnya

b. Ketetapan MPR No. 11/MPR/1983 tentang GBHN :

Demi kelestarian dan pengalaman pancasila, partai politik dan golongan karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang hanya berasaskan pancasila, sebagai satu-satunya asas (dasar hukum UU No. 3 tahun 1985 dan UU No. 8 tahun 1985).[61]

Secara kontekstual era Reformasi adala era kehidupan ketatanegaraan dan politik sesudah berakhirnya era orde baru pada tangga 21 Mei 1998 dengan ditandai lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan RI dan digantikan oleh BJ.Habibie. dalam era reformasi sampai tahun 2013 sudah diberlakukan Undang-undang yang mengatur tentang Partai politik, yakni UU No. 2 tahun 1999 tentang partai politik (LNRI tahun 1999 No. 22, TLNRI No. 3809) yang berlaku dari tanggal 1 Februari 1999 sampai tanggal 26 Desember 2002, kemudian UU No 31 tahun 2002 tentang Partai Politik (LNRI Tahun 2002 No 138, TLNR No. 4251) yang berlaku mulai tanggal 27 Desember 2002. Perubahan UUd 1945 sebanyak 4 kali (1999-2002) telah mengubah secara signifikan dan fundamental sistem

[61] C.st Kansil, *Haluan Politik Negara Indonesia*,(Jakarta: Erlangga), h. 209-210

ketatanegaraan Indonesia untuk melakukan perubahan tiga Undang-undang yakni UU partai politik, UU pemilu dan UU susduk.

Dibidang kepartaian, terbitlah UU No 31 Tahun 2002 tentang partai Politik untuk menggantikan UU No. 2 Tahun 1999 yang dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakatdan perubahan ketatanegaran. Dalam UU 31 Tahun 2002 telah mengatur tentang syarat-syarat pembentukan, larangan, pembubarandan penggabungan, pengawasan serta sanksi terhadap partai politik kehadiran Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 tahun 2008 tempak syarat-syarat pembentukan partai politik lebih ketat dari pada Undang-undang sebelumnya yaitu UU partai politik tahun 2008.[62]

Di Indonesia Undang-undang partai politik telah terjadi berapa kali perubahan antara lain:

1. Undang-undang No. 7 tahun 159 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian.
2. Undang-undang No. 13 tahun 1960 tentang pengakuan,pengawasan, dan perubahan partai-partai.
3. Undang-undang No. 3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya.

---

[62] Moh Mahfud MD & Imam anshori Saleh, *Parliamentary Threshold Dan HAM Dalam Hukum Tata Negara Indonesia… h.100-107*

4. Undang-undang No. 3 tahun 1985 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya
5. Undang-undang No. 2 tahun 1999 tentang partai politik.
6. Undang-undang No. 31 tahun 2002 tentang partai politik.
7. Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang partai politik.
8. Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang partai politik.[63]

E. Fungsi Partai Politik

Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4(empat) fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiarjo, meliputi sarana: (i) komunikasi politik; (ii) sosialisasi politik; (iii) rekruitmen politik; dan (iv) pengatur komflik. Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi partai politik itu mencakup fungsi (i) mobilisasi integrasi; (ii) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku pemilih; (iii) sarana rekrutmen politik; dan (iv) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.

Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu dengan lainnya. sebagai sarana komunikasi partai sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan atau *political interests* yang terdapat atau kadang-kadang yang tersembunyi dalam masyarakat.[64]

---

[63] Wikipedia, *Sejarah partai politik di Indonesia 2011, http//id.wikipedia.org/wiki/partai_politik_di_Indonsia. (23 januari 2011)*

[64] Jimli Asshiddiqie, *Penghantar Ilmu Hukum Tata Negara…* h.406-407

Tujuan dasar partai politik adalah mencalonkan anggotanya untuk jabatan public dan mendapatkan sebanyak mungkin suara pemilih, ketika terpilih, pejabat-pejabat tersebut akan berusaha mencapai tujuan partai melalui proses legislasi dan inisiatif program. Beberapa fungsi partai politik, yaitu sebagai berikut:

1. Representing Group Of Interests

Dalam partai politik dikenalkan istilah konstituen, yaitu orang-orang yang mendukung atau mempercayakan hak pilihannya kepada partai atau kandidat partai. partai politik menyajikan kelompok seperti halnya individu. Kelompok kepentingan ini mempunyai perhatian khusus. Misalnya, partai politik yang merepresentasikan petani, partai politik yang mempresentasikan buruh, dan sebagainya.

2. Simplifying Choice

Di beberapa Negara, partai politik mampu menempatkan dirinya pada posisi ideologi, filosofi, ataupun nilai-nilai politik tertentu. Pemilih dapat melihat partai politik tertentu berdiri pada sisi tertentu sekalipun dengan penilian secara sederhana. Dengan demikian, pemilih tidak melihat partai politik sebagai sesuatu yang semu tanpa perhatian khusus yang mencirikannya.

3. Making Policy

Partai politik secara organisasi, bukanlah pembuat kebijakan. Meskipun demikian, partai secara pasti mengambil posisi pada kebijakan penting, terutama untuk menyediakan

berbagai alternative kepada partai yang berkuasa. Partai yang berkuasa mencoba meletakkan filosofinya dalam praktik undang-undang.[65]

Partai politik dapat dikatakan merupakan respesentation of ideas atau mencerminkan suatu preskripsi tentang Negara dan masyarakat yang dicita-citakan. Partai politik dibentuk untuk memperjuangkan preskripsi itu menjadi kenyataan. Ideology, platform partai atau visi misi seperti inilah yang seharusnya menjadi motivasi dan penggerak utama kegiatan partai politik. Partai politik juga merupakan pengorganisasian warga Negara yang menjadi anggotanya untuk bersama-sama memperjuangkan dan mewujudkan Negara dan masyarakat yang dicita-citakan tersebut. Karena itu partai merupakan media atau sarana partisipasi warga Negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public dan dalam penentuan siapa yang menjadi penyelenggara Negara pada berbagai lembaga Negara di pusat dan di daerah.[66]

F. Rekrutmen Keanggotaan Partai Politik

Rekrutmen adalah proses mendapatkan sejumlah pegawai/karyawan yang *qualifeied* untuk mengisi suatu jabatan tertentu, kegiatan ini pada intinya merupakan implementasi analisis jabatan dan perencanaan Sumber Daya Manusia. metode

---

[65] Muslim Mufti & Ahmad Syamsir, *Pembangunan Politik*… h. 31-32

[66] Andy Ramses M La Bakry, *Politik dan Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, 2009), h. 139

pada umumnya digunakan dalam rekrutmen pegawai melalui advertising media masa, media elektronik, instansi terkait yang secara khusus.

Tahapan proses rekrutmen menurut (Roberts, dan Grant, 1983;Walker, 1992; Fisher, Schoenfeldt, and shaw, 1993;Harvey and Bowin, 1996; Dessler, 2003; Kreitner dan Kinicki, 2005;Robbins, 2006) terdiri dari:

a. Indentifikasi kebutuhan rekrutmen.
b. Indetifikasi persyaratan.
c. Memutuskan sumber-sumber pontensial untuk rekrutmen.
d. Memutuskan metode seleksi.
e. Membuat daftar kandidat atau calon pekerja.
f. Memilih kandidat yang memenuhi syarat.
g. Mengumumkan atau memberi tahu kandidat tentang hasil seleksi.
h. Memberikan kesempatan kepada kandidat yang berhasil melewati proses seleksi.[67]

Rekrutmen politik adalah proses penempatan atan individu ke dalam struktur-struktur sistem politik. Proses penempatan tersebut guna mengisi kekosongan ataupun melakukan rotasi elite. Rekrutmen politik dilakukan oleh partai politik, pemerintah, ataupun lembaga-lembaga yang memiliki otoritas politik.

---

[67] Erni R.Ernawan, *Organzational Culture* ,(Bandung: Alfabeta 2011), h. 213

Proses rekrutmen politik ini paling jelas terlihat tatkala berlangsung pemilihan umum dengan partai politik sebagai gudang cadangan sumber daya manusia. Di Indonesia, proses ini berlangsung bertingkat-tingkat melalui pemilihan presiden, anggota DPR RI, DPRD pemilihan umum juga dapat dikatakan sebagai upaya sistem politik memperbaharui diri.

Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, peran partai-partai dalam proses rekrutmen pejabat public cukup besar. Terdapat dua lokus proses rekrutmen politik yang penting, yaitu rekrutmen internal partai politik dan rekrutmen anggota legislatif (termaksud kepala Negara dan daerah yang juga diajukan partai-partai politik).[68] Berdasarkan prinsip bahwa keanggotaan partai politik terbuka bagi semua warga Negara, sehingga para anggotanya berasal dari berbagai unsur suku, maka partai politik dapat pula menjadi sarana integrasi nasioanal.[69]

Ideologi partai politik sebagai institusi rakyat untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingannya, ideology tentulah diperlukan sebagai cara pandang dunia (*weltanscbaung*). Dalam penggunaannya, ideologi dimanfaatkan sebagai penentu proses politik yang terdiri dari interaksi kegiatan politisi intra dan ultra antar partai, atau sebagai kamuflase motivasi aktor politik.

---

[68] Seta Basri, *Sistem Politik Indonesia,* (Depok, KDT 2013), h. 105-106

[69] Andy Ramses M La Bakry, *Politik dan Pemerintahan Indonesia…* h. 139

Dimana partai politik tidak mendominasi Negara dibawah rezim demokrasi terpimpin dan pancasila, kaum politisi bersikap ganda terhadap ideology. Secara formal dan verbal mereka mengkapanyekan kepada rakyat supaya mengikuti langkah mereka yang didasarkan pada ideologi Negara dan partai, akan tetapi secara riil mereka terperosok kepada kecenderungan untuk memanfaatkan ideology sebagai legitimasi polesan bagi kepentingannya sendiri. [70]

[70] Mahrus Irsyam Lili Romli, *Menggugat Partai Politik, (*Jakarta, LIP FISIP UI 2003), h. 14

BAB IV
MODEL REKRUTMEN KEANGGOTAAN PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA DEWAN PIMPINAN WILAYAH BANTEN

Sudah menjadi semacam kebiasaan di kalangan orang-orang tertentu untuk mengindentikan Islam dengan salah satu sistem (politik yang sedang menjadi modlel pada masanya, maka pada saat sekarang pun terdapat orang-orang yang mengatakan bahwa Islam adalah suatu (sistem) demokrasi. Azas pertama dalam teori politik Islam kepercayan terhadap keesaan (tauhid) dan kedaulatan Allah adalah landasan dari sistem sosial dan moral yang dibawa oleh para Raul (Allah). Ajaran pokok Islam menyatakan bahwa manusia, secara individual maupun kolektif harus memberikan semua haknya untuk memimpin, menetapkan aturan dan dan melaksanakan tanggung jawab kepemimpinannya kepada sesamanya.[71] Gerakan pembaruan bangkitnya nasionalisme di dunia Islam dan tumbuhnya gerakan partai yang memperjuangkan negaranya memasuki dunia politik, karena Islam memang tidak bisa dipisahkan dengan politik. Gagasan politikyang pertama kali munsul adalah gagasan Pan-Islamisme

[71] John J.Donohue, *Islam dan Pembaharuan*¸(Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1995). H. 464-465

(persatuan Islam sedunia yang mula-mula didengungkan oleh gerakan Wahhabiyah dan Sanusiyah.[72]

Pengertian dan fungsi partai politik yang dikemukakan masih umum. Visi dan misinya amat terbuka, dapat berdasarkan sekuler, kapitalis, sosialis, komunis, atau Islam. Penting sekali memosisikan dan memahami hakikat partai politik (*Hizbun siyasiy)* dalam sudut pandang Islam. Secara bahasa, lata *Hizb* dipakai beberapa ayat Al-Quran antaranya Imam jalalin dalam memahami kata '*Hizb (hizbullah)'* dalam surat Al-Maidah ayat 56 dan Al-Mujadilah ayat 22.

وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ

Artinya: *"Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang"* (Q.S Al-Maidah ayat 56).

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ

وَلَوْ كَانُوا۟ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُو۟لَٰٓئِكَ كَتَبَ فِى

قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ

[72] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam,*(Jakarta: rajawali Pers,20115) H.184

خَٰلِدِينَ فِيهَا رَضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ أُوْلَٰٓئِكَ حِزۡبُ ٱللَّهِۚ أَلَآ إِنَّ حِزۡبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ.

Artinya: *"Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung".* (Q.S Al-Mujadilah ayat 22)

Ayat di atas menjelaskan sebagai pengikutnya *(atba')* serta orang-orang yang mengikuti perintah Allah dan menjahui larangannya.[73] Dalam Al-Quran istilah partai disebut dengan perkataan *hizb*, partai (*hizb*) secara lughawi mempunyai makna;

[73] Ayi Sofyan, M.Si, *Etika Politik Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) H.33-34

pertama, suatu komonitas yang memiliki kesamaan konsep dan aktivitas; *kedua,* kumpulan yang memiliki kekuatan dan persaudaraan; *ketiga,* kader serta partisipasinya. Mengingat pengertian istilah, partai atau *Hizb* adalah suatu kumpulan masyarakat yang menyatu karena memiliki arah, sasaran dan tujuan yang sama.

Para pakar Fiqh Siyasah dalam bebrapa bukunya mengaitkan persoalan partai politik dengan perkataan *Hizb* dal Al-Quran. Mereka menyimpulkan perkataan *Hizb* adalah ekuivalen untuk istilah partai pada zaman modern ini, mereka juga merujuk pada firman Allah dal Al-Quran;

فَرِحُونَ لَدَيْهِمْ بِمَا حِزْبٍ كُلُّ ۖ زُبُرًا بَيْنَهُمْ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ

Artinya: *"Kemudian mereka (pengikut-pengikut rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing)".*(Q.S Al-Mu'minun ayat 53). [74]

Pembicaraan tentang politik merupakan wacana dinamis dan tidak akan pernah berhenti selama ada masyarakat sebab manusia meminjam istilah Filsuf Yunani adalah *Zoon Politicon* (hewan politik) arrtinya dimanapun berada, ia akan selalu berkutat dalam masyarakat politik dengan jenisnya sendiri.

---

[74] Diadana, "Partai politik dalam perspektif Islam", Jurnal Hasanuddin Yusuf Adan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, h.287

Terlepas dari perdebatan apakah Islam menggariskan konsep yang baku tentang Negara dan sistem politik atau tidak, tidak ada yang menyangkal bahwa Nabi Muhammad SAW. Tidak diutus hanya untuk mengajarkan ibadah dan akhlak, tetapi berjuang membangun komunitas sosial-politik yeng disegani di Madinah dan membawa ajaran dan etika politik Islam.[75]

A. Latar Belakang Pendirian Partai Solidaritas Indonesia.

Partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri atas perilaku-perilaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintah yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, partai politik juga merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas.[76]

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-

---

[75] Ayi Sofyan, M.Si, *Etika Politik Islam… h.35*
[76] M.Zainor Ridho, *Penghantar Ilmu Politik… h.83-84*

nilai, dan cita-cita yang sama.[77] Keberadaan partai politik dimaksud sebagai sarana untuk meredam konflik kepentingan ataupun persaingan yang muncul dilingkungan masyarakat dalam mempengaruhi pemerintahan.[78]

Partai politik dalam aktifitasnya berfungsi untuk merepresentasikan kepentingan publik ke sektor yang lebih tinggi, yakni Negara atau pemerintah. Oleh sebab itulah persyaratan dan tata cara pendirian partai politik harus diatur dalam instrument hukum, yakni undang-undang. Secara umum ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah partai politik di Indonesia. Salah satu persyaratan itu tidak lain harus memiliki Anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang disahkan melalui akta Notaris. Kemudian didaftarkan ke departemen Hukum dan HAM (DEPKUMHAM). Dengan adanya persyatan semacam ini, maka sejatinya partai politik tidak lain adalah sebuah badan hukum yang merupakan subyek hak.[79]

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terlahirkan berawal dari obrolan santai di sebuah kafe di bilangan Jakarta Selatan setelah pemilu 2014, pertemuan dilakukan tidak terlepas fenomena terpilihnya Joko Widodo dalam Pemilihan presiden 2014. Raja Juli antoni, Grace Natile, Isyana Bagus Oka dan dua pemuda lainnya bertemu dikafe hingga membuahkan keinginan untuk

---

[77] Miriam budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik…403-404*
[78] Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia… h. 260*
[79] Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia… h.267*

membuat partai politik hal ini pun tidak begitu saja terjadi. Obrolan belima orang ini terus berbicara soal reformasi partai politik di Indonesia.[80]

Dewan Pembina pun ikut hadir dalam proses pembentukan partai solidaritas Indonesia yang seperti dituangkan dalam surat KEMENKUMHAM (kementrian hukum dan hak asasi manusia) Jefri Geovani, Grace Natali dan Raja Juli Antoni adalah orang-orang yang mencetuskan untuk membuat partai yang ruang lingkupnya lebih ke Anak muda dan perempuan dengan menebarkan kebajikan, keberagaman. Partai Solidaritas Indonesia lahir tidak dari organisasi-organisasi yang dapat mengumpulkan masa, bayangkan saja jika anak muda mau bergerak itu tidak ada hal-hal yang tidak mungkin partai-partai yang lama mungkin berdiri berasal dari sebuah organisasi kemasyarakatan terlebih dahulu, tetapi PSI hadir dengan kekuatan anak muda dari obrolan ngopi dikafe menjadi sebuah partai politik dengan usia satu tahun kemudian lulus KEMENKUMHAM kemudian di verifikasi KPU dan satu tahun kemudian dinyatakan peserta pemilu 2019.[81]

---

[80]Media Online Tribun News di akses pada Tanggal 16 Februari 2019 dari www.tribunnews.com/nasional/2018/02/25/pembentukan-partai-psi-berawal-dari-obrolan-di-kafe

[81] Hasil Wawancara Dengan Bapak Budi Harto, *Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Banten*, Di Perumahan Citraland Ciracas kota serang pada tanggal 29 Januari 2018. WIB 14.32 WIB

Verifikasi administrasi faktual partai solidaritas Indonesia dewan Pimpinan wilayah :

SK

Sk kepengurusan DPW PSI yang menyertakan 40% keterwakilan perempuan

KESBANGPOL

PROVINSI

Surat keterangan terdaftar di kesbangpol provinsi

KTP

Fotocopy KTP pengurus yang dilegalisir pejabat berwenang

SERTIFIKAT

Sertifikat atau surat sewa atau surat perjanjian pinjam pakai yang dilegalisir notaris

KETERANGAN DOMISILI

Surat keterangan domisili kantor dari lurah/kepala desa setempat

KANTOR TETAP

Kantor trtap yang berkedudukan di ibukota provinsi

SURAT PENGUNDURAN DIRI

Surat Pengunduran diri dari partai asal bagi pengurus yang aktif dari partai lain

PERNYATAAN

Peryataan bermaterai sebagai pengurus PSI dan tidak menjadi pendiri, pengurus, atau anggota partai lain

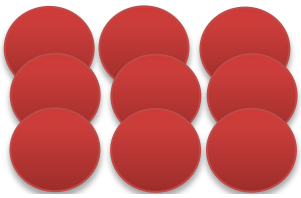

Kelengkapan kantor sesuai standar verifikasi

Pada tanggal 10 Oktober 2017 PSI DPP mendaftarkan verifikasi faktual ke KPU RI dengan membawa 150 boks konteiner yang berisi berkas untuk persyaratan peserta pemilu 2019, Dokumen yang dibawa PSI pun diterima langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman.[82]

Sebetulnya kalau PSI mau mengacu ke sejarah bayangkan pada tahun 1928 adanya kongres sumpah pemuda dijaman itu tidak ada yang namanya internet, tidak ada yang namanya Whatsapp tidak ada yang namanya sms semua hanya berdasarkan telegram dan alat komunikasi konvesional tetapi mampu mengumpulkan pemuda untuk mendeklarasikan yang namanya "Sumpah Pemuda" dengan alat komunikasi yang minim dengan kekuatan pemudalah mampu berkumpul. Dijaman sekarang teknologi sudah canggih alat komunikasi sudah mendukung, kenapa tidak dalam waktu satu tahun setengah bulan kita bisa membuat sesuatu hal baru tanpa ada kekuatan pemuda sebetulnya sulit, tetapi semnagat anak muda yang perduli terhadap politik karena politik sendiri adalah sarana di masa demokrasi.[83]

Yang mengilhami lima orang pemuda dalam pembentukan partai solidaritas Indonesia guna untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, saat ini ada 89

---

[82] Media Online Tribun News diakses pada 25 Februari 2019 dari http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/10/psi-daftar-ke-kpu-sebagai-calon-peserta-pemilu-2019

[83] Hasil Wawancara Dengan Bapak Budi Harto, *Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Banten*, Di Perumahan Citraland Ciracas kota serang pada tanggal 29 Januari 2018. WIB 14.32 WIB

persen masyarakat Indonesia yang tidak mengindetifikasikan dengan partai yang ada saat ini.[84] Pendiri PSI optimistis ingin kembali memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap politik dan partai politik yang di hadirkan dengan memberikan solusi.[85]

Trilogi Perjuangan Partai Solidaritas Indonesia

1. Menebar Kebajikan

   Tuhan bersama anak muda yang berani, menjadi tugas PSI mendekatkan kembali kata "politik" pada makna kebajikan.

2. Merawat keberagaman

   Mengakui NKRI adalah juga mengakui keragaman. Kedaulatan NKRI adalah juga kedaulatan rakyat, suku bangsa, adat istiadat dan keyakinan di Nusantara.

3. Mengukuhkan Solidaritas

   Indonesia adalah kepingan warna-warni yang dieratkan oleh solidaritas. Menjaga Indonesia berarti [86]memenangkan solidaritas di atas kepentingan Individu.

Yang membawa PSI ke provinsi Banten, awal yang membangun PSI di Banten adalah Misbahul Ahyar dan

---

[84] Media Online Tribun News diakses pada tanggal 17 Februari 2019 http://www.tribunnews.com/nasional/2016/05/28/ini-alasan-didirikannya-partai-solidaritas-indonesia

[85] Media online berita satu diakses pada tanggal 17 Februari 2019 https://www.beritasatu.com/politik/367001-grace-natalie-psi-didirikan-bukan-untuk-sosok-tertentu.html

[86] Rani Dwi Yulianti, "startegi sosialisasi partai solidaritas Indonesia kepada kaum muda indonesia (Studi Keberhasilan lolos verifikasi Faktual)," (Skripsi fakultas Ushuluddin dan Stadi agama UIN Raden Intan Lampung 2018), h. 34-35

Muhammad Riyadho dua orang ini yang mendapat mandat dari Dewan Pimpinan Pusat. kemudian dua orang ini berkenalan dengan menjelaskan maksud dari PSI lalu sesuai dengan visi misi kami.Budi Harto mengatakan "Satu hal yang di lihat terutama saya pribadi adalah orang yang belum pernah berkecimpung di dunia politik asumsi saya terhadap partai politik adalah sekumpulan orang-orang yang ingin mendapatkan kekuasaan yang kebanyakan digunakan untuk kepentingan pribadi dan golongannya saja, tetapi saya melihat sebuah cara PSI kita analogikan PSI adalah sebuah mobil yang baru yang memang harus diisi dengan orang-orang baru tentunya dengan ide-ide baru karena ada aturan tadi orang yang pernah menjadi pengurus harian partai lain tidak bisa bergabung bersama PSI saya sendiri secara pribadi melihat bahwa ini sebuah partai yang beda dengan partai-partai yang lainnya, PSI juga bukan Partai daur ulang yang tentunya punya cara-cara yang sama dengan partai politik lama PSI hadir dengan kebaruan. Timbul semangat saya untuk terjun ke dunia politik dan ternyata politik itu bukan hal yang tidak baik partai politik akan baik apabila diisi dengan orang-orang yang baik. Berangkat dari sanalah saya bergerak untuk mencari dari saudara,teman saya jelaskan ada partai baru sistemnya seperti ini figurnya seperti ini dan tidak ada ketokohan yang menonjol semuanya sama setara dengan semangat tadi kami bisa membangun PSI di Banten".[87]

---

[87] Hasil Wawancara Dengan Bapak Budi Harto, *Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Banten*, Di Perumahan Citraland Ciracas kota serang pada tanggal 29 Januari 2018. WIB 14.32 WIB

Di era reformasi yang tidak lagi muda. Rezim reformasi telah berusia separuh baya dari lamanya rezim orde baru berkuasa salah satu akar dari deretan masalah yang ada adalah partai politik. Demokrasi meletakkan peran sentral partai politik sebagai wadah yang menyalurkan dan mengagregasi aspirasi tuntunan dan harapan rakyat, namun kebijakan partai politik yang harusnya bermuara pada kepentingan publik, diputar arah membela kepentingan segelintir elit. PSI berkeyakinan, bahwa partai baru adalah sebuah kebutuhan karena PSI percaya bahwa sirkulasi kekuasaan tanpa diisi oleh sirkulasi generasi hanya akan menjadi ajang reproduksi masa lalu, PSI didirikan untuk menggalang gerakan politik yang dilandasi oleh rasa solidaritas untuk kemanusiaan.[88]

Awal pembentukan PSI di Jakarta Dewan Pimpinan Pusat setelah itu ditiap-tiap wilayah kabupaten dan kota sampai tingkat kecamatan. Ada berapa persyaratan untuk menjadi perserta pemilu syarat untuk kepengurusan ditingkat pusat dan ditinggat wilayah harus seratus persen ada keterwakilan ditiap-tiap provinsi artinya ada artinya tiga puluh empat provinsi. Kemudian untuk tingkat kabupaten kota minimumnya harus ada lima puluh persen pengurus ditiap-tiap kecamatan kabupaten kota di provinsi Banten terpenuhi semua bahkan kabupaten kota ada seratus persen. Proses PSI berdiri tidak lepas dari lika-liku yang dialami, yang namanya politik pasti dibutuhkan kas yang membedakan

---

[88] ABC Partai Solidaritas Indonesia, *DPP PSI* Jakarta Pusat. h.4-5

PSI modal pertama adalah modal semangat anak muda dalam membangun sebuah jaringan tentunya butuh modal materi untuk keperluan ongkos dan biaya lain tetapi dengan semangat inilah PSI berjalan tanpa ada subsidi dana dari luar pasti PSI sharing income semua pengurus, bahkan untuk mengurus surat keterangan domisili kecamatan dan kelurahan itu pengurus turun langsung minta ketiap-tiap kelurahan PSI sering berbenturan dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tapi pengurus menjelaskan akhirnya mereka membantu kami dan tidak jarang juga PSI bertolak belakang dengan perangkat-perangkat pemerintahan untuk membuat surat keterangan domisili itu sangat sulit untuk oemerintah mengeluarkan surat itu, teman-teman tingkat kecamatanpun sulit untuk minta surat keterangan itu tapi tetap kami turun dan menjelaskan PSI ini sudah disahkan oleh kemenkumham pejabat-pejabat terkait ditingkat wilayah atau disetiap tingkatan itu wajib membantu tantangan seperti ini yang dihadapi kader PSI tetapi dengan semangat kami memberikan pengertian.[89]

Arti dari logo Partai Solidaritas Indonesia yang tertulis dalam Ad/Art Partai solidaritas Indonesia dalam Pasal 6 *"Partai solidaritas Indonesia belambangkan segi empat merah dnegan*

---

[89] Hasil Wawancara Dengan Bapak Budi Harto, *Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Banten*, Di Perumahan Citraland Ciracas kota serang pada tanggal 29 Januari 2019. WIB 14.32 WIB

gambar kepalan tangan mengenggam bunga mawar berwarna putih".[90]

1. Warna dasar merah melambangkan keberanian, warna putih melambangkan kesucian dan kejujuran, warna hitam melambangkan kesetian, solidaritas dan kekuatan.
2. Tulisan PSI merupakan singkatan dari partai solidaritas Indonesia, dengan huruf P yang terbuka menunjukan bahwa PSI adalah partai yang terbuka.
3. Bunga mawar putih adalah lambang solidaritas internasional dengan gagasan demokrasi substantive yang juga termaktub dalam UUD 1945.
4. Lima kelopak luar melambangkan pancasila dan tiga kelopak dalam menunjukkan Trisakti.
5. Kepalan tangan yang putih melambangkan tekad yang suci, optimis, pantang menyerah dan selalu kuat memegang teguh prinsip dan cita-cita bangsa.
6. Warna merah sebagai latar belakang menunjukkan bahwa PSI selalu berani dalam setiap gerakan politiknya, tanpa pernah gentar pada siapapun yang coba menghalangi cita-cita bangsa Indonesia.

Ide bunga mawar ini terinspirasi dari kutipan pidato soekarno tangggal 29 Juli 1956 di Semarang *"Bunga mawar tidak*

[90] AD/ART partai solidaritas Indonesia, BAB II tentang lambing dan gambar Partai pasal 6

mempropogandakan harum semerbaknya, dengan sendirinya harum semerbak itu tersebar disekililingnya".[91]

Partai solidaritas Indonesia (PSI) adalah partai politik baru yang didirikan pada tanggal 16 November 2014 berdasarkan Akta notaris Widyatmoko, SH No.14 Tahun 2014 pada tanggal 16 Desember 2014, Dewan Pimpinan Pusat PSI mengajukan secara resmi surat pendaftaran sebagai partai politik. Selanjutnya kementrian hukum dan HAM secara resmi meminta DPP PSI untuk melengkapi syarat-syarat pembentukan partai politik sesuai dengan undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang partai politik. Melengkapi syarat-syarat pembentukan partai politik inilah yang menjadi "tugas suci" pengurus PSI disemua level kepemimpinan. Ketua umum dewan pimpinan pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) adalah Grace Natalie Lousia terakhir berkerja sebagai CEO Saiful Mujani Research and Counsalting (SMRC) salah satu lembaga konsultan politik yang paling memiliki kredibilitas terbaik di Indonesia, sebelumnya Grace Natalie Lousia menjadi presenter di SCTV dan TV One.[92]

Sedangkan pada hari ini partai solidaritas Indonesia menayangkan iklan yang dipelopori oleh ketua umum dengan jargon politik "Udah-Udah" sebetulnya masyarakat melihat bahwa partai politik adalah sebuah kumpulan orang-orang yang mencari kekuasaan dengan cara-cara serius, partai solidaritas

---

[91] ABC Partai Solidaritas Indonesia, *DPP PSI* Jakarta Pusat. h.10-11

[92] Rani Dwi Yulianti, "startegi sosialisasi partai solidaritas Indonesia kepada kaum muda indonesia (Studi Keberhasilan lolos verifikasi Faktual)," (Skripsi fakultas Ushuluddin dan Stadi agama UIN Raden Intan Lampung 2018), h.42

Indonesia membuat iklan tersebut untuk mengajak dan mengedukasi masyarakat bahwa partai politik itu tidak seram yang ada dibayangan masyarakat bahwa dengan berpolitik itu bisa dilakukan dengan cara yang santai.[93]

Partai Solidaritas Indonesia disahkan oleh pemerintah pada tahun Partai ini resmi menjadi Badan Hukum setelah melalui verifikasi Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 7 Oktober 2016. Partai ini jadi satu-satunya Partai baru yang lolos seleksi badan hukum pasca Pilpres 2014. Pada pemilu 2019 Partai ini menjadi peserta pemilu dengan nomor urut 11.[94] Partai solidaritas Indonesia partai yang menyetujui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam menandai Calon Legislatif dari mantan Nara Pidana Korupsi diantara tiga partai lain yang calon legislatif diempat partai ini bebas dari narapidana korupsi.[95]

B. Mekanisme Rekrutmen keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah

Rekrutmen politik memiliki keseragaman yang tiada batas, namun pada dasarnya ada dua cara khusus seleksi pemilihan yakni melalui kriteria universal dan kriteria partikularistik. Pemilihan dengan kriteria universal merupakan

---

[93] Hasil Wawancara Dengan Bapak Budi Harto, *Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Banten*, Di Perumahan Citraland Ciracas kota serang pada tanggal 25 April 2019 13:24 WIB

[94] Media Online WikiPedia diakses pada tanggal 19 Febuari 2019 https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Solidaritas_Indonesia

[95] Media Online detikNews diakses pada tanggal19 Febuari 2019 https://news.detik.com/berita/d-4408530/bebas-caleg-eks-koruptor-psi-langkah-kami-diikuti-parpol-senior

seleksi untuk memainkan peranan dalam sistem politik berdasarkan kemampuan dan penampilan yang ditunjukan lewat tes atau ujian dan prestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan kriteria partikularistik adalah pemilihan yang bersifat primodial yang didasarkan pada suku, ras, keluarga, alamamater atau faktor status.[96] Partai politik berkepentingan untuk memperluas atau memperbanyak keanggotaan, ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui pribadi,persuasi, ataupun cara-cara lain.[97]

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik yang didalamnya BAB XI mengatur Rekrutmen Politik pasal 29:

(1) Partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga Negara Indonesia untuk menjadi:

a. Anggota partai politik

b. Bakal calon anggota dewan Pimpinan daerah Pimpinan rakyat dan dewan Pimpinan rakyat daerah.

c. Bakal calon presiden dan wakil presiden; dan

d. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

---

[96] Hesel Nogi Tangklisan, *kebijakan public yang membumi*, (Yogyakarta: Yayasan Pembaruan administrasi Publik Indonesia, 2003). H.188

[97] Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*… h. 408-409

(2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Ad/Art serta peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus partai politik sesuai dengan AD dan ART.[98]

Kebaruan partai solidaritas Indonesia (PSI) dapat diindikasikan dari karakter dan nilai dasar yang dianut PSI yang sekaligus menjadi syarat untuk bergabung dengan PSI. yaitu sebagai berikut:

1. Partai baru dengan aktivisi politik baru yang artinya adalah PSI sebagai partai baru yang dikelola oleh para aktivis politik baru yang sebelumnya tidak pernah menjadi pengurus harian partai apapun. Ini sebagai cara sadar PSI sebagai partai baru untuk memutus mata-rantai dari perilaku, spirit, dan tradisi buruk partai-partai politik lama.
2. Partai baru dengan aktivis politik muda yang artinya adalah, PSI adalah partai baru yang dikelola aktivis muda berusia di bawah 45 tahun. Dalam praktiknya, kader-kader PSI yang sudah bergabung rata-rata berusia 30 tahun.
3. Partai baru yang inklusif dan pluralis yang artinya adalah,PSI adalah partai baru yang terbuka (inklusif

[98] Undang-undang partai politik, No.2 tahun 2011 pasal 6. H. 36

dan pluralis) bagi seluruh anak negeri tanpa memandang latar belakang suku, agama dan ras mereka. Spirit inklusivitas dan pluralitas PSI juga tergambar dari pola rekruitmen kader PSI yang akan mengabdi di lembaga legislatif dan eksekutif.

4. Partai baru yang ramah anak dan perempuan yang artinya adalah, PSI adalah partai baru yang keputusan-keputusan politiknya di orientasikan kepada perbaikan kualitas hidup sosial politik dan anak dan perempuan. PSI secara konsisten membangun srtuktur organisasinya dengan memberikan porsi yang besar bagi perempuan untuk menjadi pengurus PSI. hal ini dibuktikan dengan peraturan yang ketat mengenai jumlah minimal 30% perempuan dalam kepengurusan PSI, dalam hal ini bahkan PSI berupaya untuk mencapai angka minimal 40% pengurus perempuan disetiap tingkatan.[99]

Tahapan pertama untuk mengikuti proses rekrutmen di PSI itu sendiri dengan cara mudah bagi masyarakat atau kaum millenial untuk bisa bergabung dan membuka web PSI dan ikut mendaftarkan diri secara Online, mekanisme penerimaan anggota kita merekrut dari applikasi yang telah PSI punya yaitu PSI.ID.

[99] ABC Partai Solidaritas Indonesia, *DPP PSI* Jakarta Pusat. h. 5-7

[100] pada ketentuan yang sudah ditetapkan didalam AD/ART model Rekrutmen di partai solidaritas Indonesia sendiri terdiri dari anggota biasa, kader, anggota kehormatan, dan simpatisan. Dalam pasal 10 ayat 3 berbunyi "*anggota biasa adalah individu yang telah mendapatkan kartu anggota namun belum mengikuti pelatihan yang di selenggarakan oleh partai"* ayat 4 berbunyi *"kader adalah anggota yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh partai sesuai jenjang kader"* ayat 5 berbunyi *"anggota kehormatan adalah individu yang terbukti berjasa terhadap kemajuan dan perjuangan partai"* ayat 6 berbunyi *"simpatisan adalah mereka yang berjasa terhadap partai, mendukung tujuan partai akan tetapi belum menjadi anggota namun atas permintaan yang bersangkutan didaftarkan simpatisan".*[101]

Sementara untuk menjadi kader PSI orang yang sudah siap untuk mengikuti aturan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) patuh dengan pendoman organisasi yang dikeluarkan oleh dewan pimpinan pusat.[102] PSI sendiri mempunyai strategi merekrut kader selain lewat web PSI juga mendeklarasikan kartu sakti (Solidaritas Anti Korupsi dan

---

[100] Hasil Wawancara Dengan Bapak Budi Harto, *Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Banten*, Di Perumahan Citraland Ciracas kota serang pada tanggal 26 September 2018. Wib 14.20 WIB

[101] AD/ART partai solidaritas Indonesia, BAB IV tentang Rekrutmen dan keanggotaan, pasal 10

[102] Hasil Wawancara Dengan Bapak Budi Harto, *Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Banten*, Di Perumahan Citraland Ciracas kota serang pada tanggal 29 Januari 2018. Wib 13.33 WIB

Anti Intoleransi) yang menjadi daya tarik masyarakat untuk menjadi kader PSI dengan seharga dua puluh lima ribu pemilik kartu sakti dipastikan mempunyai hak suara dalam menentukan kebijakan partai.[103]

Jenjang perkaderan dalam PSI seperti yang telah diatur dalam anggaran dasar partai berbunyi sebagai berikut: *Pasal 13 ayat (1) kader tunas adalah anggota yang belum mengikuti pengkaderan (2) kader dasar adalah anggota yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemimpin daerah atau pemimpin cabang atau organisasi sayap partai (3) kader Madya, yaitu anggota yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh pimpinan wilayah (4) kader paripurna, yaitu anggota yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggaran pimpinan pusat,*[104] seorang kader yang bisa memasuki struktur kepengurusan baik ditingkat cabang daerah maupun pusat harus sesuai dengan yang sudah diatur dalam Ad/Art syarat pertama adalah tidak pernah menjadi pengurus harian partai lain dan harus ada keterwakilan perempuan di tiap-tiap tingkatan minimum 30%.[105] PSI memberikan porsi yang besar terhadap perempuan karena masalah nasional hari ini masih dilanggengkan ketidakadilan

---

[103] https://psi.id/berita/2018/01/21/rekrut-kader-psi-bermodal-kartu-sakti/ . diakses pada tanggal 14 Februari 2019.

[104] AD/ART Partai solidaritas Indonesia, BAB V tentang sistem kaderisasi pasal 13 jenjang perkaderan

[105] Hasil Wawancara Dengan Bapak Budi Harto, *Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Banten*, Di Perumahan Citraland Ciracas kota serang pada tanggal 29 Januari 2018. WIB 13.02 WIB

gender, manfaat dan partisipasi politik perempuan terhadap pembangunan jadi berangkat dari sanalah PSI memberikan porsi sebanyak 30% bahkan sampai 40% agar mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, dan mengurangi rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik, jabatan publik, dan bidang ekonomi. PSI sendiri memberikan ruang kepada perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.[106]

Ada aturan pengurus partai yang dibatasi maksimal umur 45 tahun rata-rata pengurus daerah 20-30 tahun . Untuk jenjang struktur kepengurusan karena PSI partai baru di tahun 2014 tentunya harus memenuhi kepengurusan di tiap-tiap tingkatan dengan cara merekrut mulai dari komunitas yang ada jaringan yang PSI miliki Contohnya: dari tingkat pusat mempunyai jaringan ditingkat wilayah kemudian meminta kadernya atau anggota partainya untuk siap menjadi pengurus di pusat dan berlaku disetiap tingkatan baik cabang, daerah, wilayah dan pusat, seperti hal kepengurusan di Dewan Pimpinan Wilayah Banten DPW sendiri ada penggantian ketua itu sebanyak empat kali dari masa KEMENKUMHAM jika ada kekosangan jabatan dibadan pengurus harian partai apabila seorang ketua mengundurkan diri maka jenjang kepengurusan akan berubah yang tadinya sekretaris akan menjadi ketua dan wakil sekretaris akan menjadi sekretaris. Pada masa itu diminta untuk menjadi

---

[106] ABC Partai Solidaritas Indonesia, *DPP PSI* Jakarta Pusat. h.26

ketua yang tadinya sekretaris itupun ada jenjangnya juga untuk mengisi kekosongan yang tinggalkan dari beberapa DPD yang DPW nilai memiliki kinerja baik, karena PSI sendiri lebih mengedepankan meritrokasi bukan berdasarkan musyawarah luar biasa yang nantinya akan berujung konflik kepentingan, tapi kalau dilihat kinerja yang baik misalkan pemenuhan kouta keanggotaan di tiap-tiap kabupaten atau kota yang dia pimpin ternyata sangat baik hal ini tidak menutup kemungkinan pengurus DPW tarik untuk mengisi kekosong di tingkat DPW. Sekretaris DPW yang sekarang adalah mantan ketua DPD kota Tanggerang selatan yang kita tarik untuk mengisi kekosongan ditingkat DPW, yang awalnya kita mengajukan nama ada tiga dari Ketua DPD kota serang, DPD Lebak dan DPD Tanggerang selatan, sedangkan proses pemilihannya diawali dengan musyawarah yang dihadiri oleh salah satu Pimpinan dari pusat dan kebetulan pada saat pengisi kekosongan yang kemarin itu DPW dihadiri langsung oleh tiga orang dari DPP yaitu Grace Natali, Ending dan Oka yang musyawarahnya bertempatan di kantor DPW Banten, kemudian mengajukan tiga nama tadi untuk mengisi kekosongan nama itu tetap DPW akan mengolah setelah DPW punya rumusan baru di ajukan kepusat.[107]

Yang membuat PSI beda dengan partai lain, PSI adalah partai baru yang konsisten merekrut pengurusnya yang bukan

[107] Hasil Wawancara Dengan Bapak Budi Harto, *Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Banten*, Di Perumahan Citraland Ciracas kota serang pada tanggal 29 Januari 2018. WIB 14.32 WIB

bagian dari partai politik lama tidak punya ketersambungan dengan kekuatan politik lama. PSI secara konsisten memisahkan antara dua hal yang selama ini kadang menjadi kabur, antara pengurus partai dan pengurus politik , sejak awal PSI telah memisahkan struktur politik dengan struktur administratifnya, tidak akan terjadi politisi mengurus administrasi partai lalu menggunakannya untuk kepentingan kekuasaan, karena partai akan diurus oleh orang-orang yang professional yang paham betul bagaimana mengurus organisasi yang modern, professional, bersih dan transparan.[108]

Didalam partai politik pasti mempunyai kode etik yang berlaku untuk kader dan anggota partainya, pasti sudah diatur dalam aturan disetiap partai politik, Partai solidaritas Indonesia adalah partai baru ditahun pemilu 2019 dengan mengenalkan diri ke masyarakat selogan partai anak muda yang pasti didalamnya mempunyai kode etik sendiri. Partai solidaritas Indonesia mempunyai aturan etika publik kader PSI selain memperjuankan nilai-nilai keadaban (etika publik) melalui jalur politik, PSI juga mensyaratkan kader-kadernya untuk memperaktikan nilai-nilai keadaban dalam kehidupan sehari-hari. PSI bukan partai agama, namun mengobjektivitas nilai-nilai agama untuk ditransformasikan menjadi etika publik. Selain berdasarkan nilai-

[108] ABC Partai Solidaritas Indonesia, *DPP PSI* Jakarta Pusat. h. 26

nilai universal agama-agama sumber etika moral kader PSI juga berasal dari kearifan lokal dan global.[109]

Dalam pendoman organisasi ada peraturan tertulis tentang kode etik pada saat perekrutan calon anggota legistlatif disitu sudah dijelaskan bahwa seorang kader PSI tidak boleh berpoligami ada dalam peraturan. Yang dilarang untuk berpoligami itu kader dan anggota hal ini tidak bertentangan selama tidak melanggar HAM dan hal yang sudah ditetapkan dalam aturan agama, padahal berpoligami sebenarnya tidak juga dianjurkan tetapi banyak orang yang menganggap poligami itu sunnah tidak dianjurkan silahkan berpoligami tetapi jika mampu. Kalau PSI lihat lebih dalam lagi pelanggaran HAM menganiyaya hati seorang isteri satu hal yang memang tidak dibolehkan juga.[110] Sebenarnya larangan berpoligami itu tidak ada hanya PSI melihat anggota-anggota dewan itu tidak jauh dari harta, tahta, dan wanita tidak ada anggaran anggota dewan untuk dua isteri atau tiga isteri tapi PSI melihat anggota dewan PSI gajinya dari rakyat tapi digunakan untuk menikah lagi.[111]

---

[109] ABC Partai Solidaritas Indonesia, *DPP PSI* Jakarta Pusat. h. 24

[110] Hasil Wawancara Dengan Bapak Budi Harto, *Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Banten,* Di Perumahan Citraland Ciracas kota serang pada tanggal 29 Januari 2018. WIB 14.32 WIB

[111] Hasil Wawancara Dengan Bapak Mochammad Nofal, *Calon legislatif DPRD Tingkat II Kota serang,* Di Perumahan Citraland Ciracas kota serang pada tanggal 29 Januari 2018. Wib 15.11 WIB

C. Strategi PSI mengusung anggota partainya untuk menjadi calon anggota legislatif

Rekrutmen politik berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yeng berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri.[112]

Menurut teori Almond dan Powel prosedur-prosedur rekrutmen partai politik terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Prosedur tertutup adalah rekrutmen yang dilakukan oleh elit partai yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan kapasitas yang dimilikinya untuk memimpin.
2. Prosedur terbuka adalah setiap masyarakat berhak untuk memilih siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin didalam negaranya serta pengumuman hasil pemenang dari kompetisi tersebut dilaksanakan secara terbuka dan terang-terangan.

Mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan partai politik terdari dari dua sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka akan memungkinkan lahirnya calon-calon legislatif yang

---

[112] Mariam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*… h.408

betul-betul demokrasi dalam melaksanakan tugas dan wewenangannya.[113]

Mekanisme penjaringan calon anggota legislatif Partai Solidaris Indonesia dengan sistem terbuka, PSI juga membuka untuk pendaftaran calon anggota legistlatif lewat media online cara itu dinilai lebih murah, efektif dan transparan. Melalui jejaring sosial. Sementara, untuk menyeleksi setiap calon anggota legislatif PSI membentuk tim juri panel independen mereka terdiri dari tokoh-tokoh macam mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, mantan Ketua KPK Bibit Samad Riyanto hingga CEO NET Wisnutama. Merekalah yang nanti menilai rekam jejak para caleg yang mendaftar secara online atau offline ini ditingkat pusat. [114]

PSI sendiri menjaring kader untuk menjadi anggota legislatif ada beberapa hal yang dilakukan PSI pertama dari media sosial (media online) bisa dilihat di web PSI.ID bahwa ada Tag line dicari orang baik untuk menjadi anggota legislatif 2019. Dari media sosial itu kemudian coba turunkan ke tingkat provinsi dan tingkat kabupaten, baik ditinggkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota dengan ketentuan yang sama semua harus melalui tahapan-tahapan tersebut. Caranya membuat tulisan atau karya ilmiah

---

[113] Syamsuddin haris, *pemilu langsung ditengah oligarki* (Jakarta: PT Gramedia, 2005) h. 180

[114] Media Online Rappler diakses pada 23 februari 2019 dari https://www.rappler.com/ indonesia/berita/184663-psi-jaring-caleg-2019-media-sosial

minimal satu halaman dengan judul melawan korupsi dan melawan intoleransi, dari teman ke teman dari sebuah plafrom yang kami punya yang namanya SIAP (sistem informasi administrasi PSI) yang mendaftar melalui itu juga banyak dengan jaringan yang ada melalui DPC begitu ada yang masuk untuk memfollowup orang yang mendaftarkan diri untuk menjadi calon legislatif melalui PSI, setalah itu dihubungi ada beberapa yang siap melalui tahapan lulus dan ada juga yang kami hubungi dengan "sesuatu hal di benaknya" kemudian dari administrasi ia tidak memenuhi iapun mundur.

Administrasi untuk menjadi calon anggota legislatif, yang pertama memberikan tulisan dengan mendaftarkan diri dengan data yang sesungguhnya. Setelah tulisan itu PSI pelajari kemudian memnuhi syarat baru melalui tahapan kedua tahapan ini seleksi untuk juri independen dan yang terakhir tahapan sosialisasi ke masyarakat.[115]

Bakal calon anggota legislatif mendaftarkan diri secara online di laman yang sudah disediakan, para pendaftar mengisi dokumen mulai dari formulir elektronik, daftar riwayat hidup hingga menulis karangan singkat tentang apa upaya mereka mengatasi

[115] Hasil Wawancara Dengan Bapak Budi Harto, *Ketua Dewan pimpinan Wilayah Provinsi Banten*, Di Perumahan Citraland Ciracas kota serang pada tanggal 29 Januari 2019. WIB 14.32 WIB

permasalahan korupsi dan intoleransi di Indonesia.[116] Di adakan tahap seleksi wawancara yang melalui juri independen dari pihak akademisi yaitu dosen dari Unsera, pakar politik dan elite politik PSI.[117]

Bakal calon anggota legislatif diusung sesuai dengan legalitas PSI, beberapa hal yang sudah terjadi contoh beberapa kasus yang dikeluarkan didaerah Madura ketika tidak sesuai dengan legalitas PSI. sejauh ini di Banten sendiri tidak ada hal seperti itu. Dan jumlah calon anggota legislatif dari generasi millenial hampir semua generasi millennial hanya ada satu calon anggota legislatif yang usianya diatas 56 tahun selebihnya dibawah 50 tahun. Di provinsi Banten sendiri tidak semua dapil penuh mungkin karena tadi tahap seleksi yang sangat ketat, mungkin kalau hanya datang dengan tas isi bisa Fulkan tetapi PSI mencari bukan caleg dengan tas isi namun ide-ide yang bagus, bayangkan seorang koruptor suruh menulis melawan korupsi tentunya ada perang batin didalam diri koruptor tadi.[118]

---

[116] Media online Kompas Com diakses pada tanggal 24 februari 2019 dari https://nasional.kompas.com/read/2018/04/21/19212861/mencari-wakil-rakyat-ala-psi-bakal-caleg-akan-diuji-sejumlah-pakar

[117] Hasil Wawancara Dengan Bapak Budi Harto, *Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Banten,* Di Perumahan Citraland Ciracas kota serang pada tanggal 21 Desember 2018. WIB 15.09 WIB

[118] Hasil Wawancara Dengan Bapak Budi Harto, *Ketua Dewan pimpinan Wilayah Provinsi Banten,* Di kantor DPW Provinsi Banten pada tanggal 26 September 2018. WIB 14.32 WIB

Strategi Calon legislative menawarkan gagasan terhadap masyarakat agar bisa memilihnya, pertama saya menawarkan gagasan dari PSI yang mulai kontroling anggota dewan itu bisa melalui applikasi, yang kedua pengembangan sumber daya manusia di masyarakat seperti apa kedepannya. kalau kita pengembangan sumber daya manusia lebih ke terfokuskan bagaimana mereka itu jaminan kesehatannya dapat, pendidikannya. Menurut Mochammad Nofal "Kalau saya pribadi lebih fokusnya di kesehatan sama di pendidikan, pengembangan pemuda-pemudanya, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (kumkm). Bagaimana nanti dana rese itu digunain bukan untuk bagi-bagiin saja.

Kalau kita lihat hari ini secara aktualnya dana reses ngumpulin orang di rumah warga yang dipanggil hanya Pimpinan, sedangkan dari dana reses dalam setahun bisa sampe tiga kali sekali reses 20 juta kalau saya ingin membuat dana itu mutar. Cuma nanti kedepannya reses mau seperti apa di musyawarahin lagi bersama masyarakat baiknya seperti apa, Cuma kedepannya untuk kami yang namanya UMKM kami akan ada presentasisetiap masyarakat yang punya usaha apa kedepannya pergerakan seperti apa keuntungan seperti apa, jadi kembali lagi swadaya ke masyarakat.

Kalau di PSI saya nyatakan sampai detik ini memang tidak ada sama sekali mahar politik, bayangkan saya latar belakang

hanya pegawai konsultan. kita lihat seorang pegawai konsultas dengan usia muda yang baru lulus kuliah terus sampe dimintai mahar saya sendiri tidak menyanggupi hal itu, yang kedua saya denger nyaleg tanpa mahar saya keliling kesetiap partai yang lain okelah parta-partai yang sudah punya nama tidak bisa dipungkiri mereka pasti main mahar saya mencari perbandingan ke partai-partai baru ternyata itu ada mahar politik meskipun saya pribadi tidak tahu berapa nilai rupiahnya, yang ketiga di PSI sendiri pun kalau boleh jujur kaya buat medical check up buat Skck itu dibantu oleh partai. intinya komitmen saya selama ada niat baik pasti ada jalan .

Setoran kepartai pun sampai detik ini tidak ada, PSI sendiri mengharapkan tidak ada setoran kepartai coba kita kembangin setoran ke masyarakat langsung. Rata-rata relawan saya relawan yang masih muda ada juga yang berasal dari mahasiswa, soalnya relawan yang kami bentuk itu jangka panjang bagaimana supaya relawan itu kedepannya ia yang dikenal oleh masyarakat nanti untuk menjaga konstituen mereka-mereka yang menjaga berhubungan langsung dengan masyarakat. Berangkat dari sanalah kami termaksud kader kita bimbing untuk jangka panjang

untuk 10 bahkan 20 tahun kedepan, relawan disini yang benar-benar relawan tidak ada yang ngebosin atau segala macam".[119]

Karena sejak awal PSI memang telah diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki beban sejarah masa lalu, maka dengan mudah PSI bisa menetapkan kriteria yang ketat bagi seluruh anak bangsa yang memiliki kualitas dan integritas sesuai dengan legalitas PSI untuk menjadi Pimpinan PSI di parlemen.[120]

---

[119] Hasil Wawancara Dengan Bapak Mochammad Nofal, *Calon legislatif DPRD Tingkat II Kota serang*, Di Perumahan Citraland Ciracas kota serang pada tanggal 29 Januari 2018. Wib 15.11 WIB

[120] ABC Partai Solidaritas Indonesia, *DPP PSI* Jakarta Pusat. h.34

BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Latar belakang berdiri Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yaitu, berangkat dari kegelisahan yang sama para pendiri partai di tahun 2014 pasca pemilihan umum presiden. Obrolan hanya lima orang pemuda dengan melihat polemik setelah pemilu 2014, lalu Dewan Pembina pun ikut hadir dalam proses pembentukan partai solidaritas Indonesia yang seperti dituangkan dalam surat KEMENKUMHAM (kementrian hukum dan hak asasi manusia) Jefri Geovani, Grace Natali dan Raja Juli Antoni adalah orang-orang yang mencetuskan untuk membuat partai yang ruang lingkupnya lebih ke Anak muda dan perempuan dengan menebarkan kebajikan, keberagaman. Kemudian PSI mendaftarkan verifikasi faktual untuk menjadi perserta pemilu 2019 pada tanggal 10 Oktober 2017 Dengan kekuatan anak muda PSI pun lulus verfikasi faktual untuk menjadi peserta pemilu 2019 dengan nomor urut 11. Hingga PSI masuk ke provinsi Banten Misbahul Ahyar dan Muhammad Riyadho dua orang ini yang mendapat mandat dari Dewan Pimpinan Pusat. kemudian dua

orang ini berkenalan dengan menjelaskan maksud dari PSI lalu sesuai dengan visi misi kami.

2. Mekanisme Rekrutemen keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ialah sistem online dan transaksi langsung melalui jejaring kader jika masyarakat ingin terjun langsung ke birokrasi melalui partai politik di Indonesia yang sesuai dengan visi-misi individu. PSI adalah partai yang isinya anak muda dan kaum perempuan untuk membolisasi generasi millennial agar perduli dengan sistem birokrasi di Indonesia. PSI sendiri mempunyai strategi merekrut kader selain lewat web PSI juga mendeklarasikan kartu sakti (Solidaritas Anti Korupsi dan Anti Intoleransi) yang menjadi daya tarik masyarakat untuk menjadi kader PSI dengan seharga dua puluh lima ribu pemilik kartu sakti dipastikan mempunyai hak suara dalam menentukan kebijakan partai. yang membuat PSI beda dengan partai lain ialah dalam sistem kepengurusan partai, PSI sendiri mempunyai aturan pengurus harian PSI tidak boleh mempunyai beban masa lalu yaitu yang pernah menjadi pengurus harian di partai politik lain dan rata-rata umur pengurusnya pun tergolong muda dibawah 45 tahun.

3. Strategi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam mengusung anggota partainya untuk menjadi calon anggota legislatif yaitu, menggunakan sistem terbuka dan mempunyai seleksi wawancara di nilai oleh tiga juri yang bukan dari elit partai, pendaftran ini terbuka secara online pula. Syarat tertentu ialah pelamar calon legislatif yang melalui PSI harus membuat karya ilmiah yang berjudul melawan korupsi dan intoleransi. Bakal calon anggota legislatif diusung sesuai dengan legalitas PSI, yang diterimapun yang mempunyai kredibilitas dan gagasan perubahan yang konkrit. Di provinsi banten hampir semua calon anggota legislatif adalah anak muda atau generasi milenial.

F. Saran

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran berdasarkan hasil analisa yang penulis lakukan selama penyusunan skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mekanisme perekrutan keanggotaan PSI perlu diperhatikan bagi partai-partai politik lainnya proses perekrutan dalam partai politik sangat penting, untuk jenjang pengkaderan mengingat pada hari ini gerbang awal seseorang ingin memasuki dunia legislatif dan eksekutif harus melalui partai politik agar kedepannya partai politik di Indonesia mempunyai mekanisme khusus

untuk menyiapkan pemimpin yang mmepunyai kredibilitas memalui tahap perekrutan partai politik. Dan PSI juga harus membuka diri untuk kader partai yang siap menjadi pengurus harian partai tanpa harus melihat rekam jejak seseorang.

2. Di Indonesia banyak partai politik sesuai dengan suku, ras dan agama yang berdiri dengan kebijakan dan penawaran yang berbeda terhadap masyarakat, maka dari itu PSI harus membangun Citra partai di masyarakat yang baik yang berdasarkan nilai-nilai pancasila.
3. Strategi sosialisai menjaring kader untuk menjadi pemimpin akan lebih baik apabila selalu melalui pedekatan yang tepat dengan setiap unsur yang terdapat dalam masyarakat , memberikan pemahaman yang baik kepada anak muda untuk terjun kedunia politik praktis. Dan PSI juga harus tetap mempertahan aturan yang ada dalam AD/ART agar mempertahankan calon anggota legislatif PSI tidak pernah punya rekam jejak korupsi.